# PERAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PEMBINAAN KEADABAN KEWARGANEGARAAN *(CIVIC VIRTUE)* BAGI PEMUDA DI DESA BRAJA ASRI

**(Skripsi)**

Oleh

**YULIANTI PUSPITA DEWI**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**
**UNIVERSITAS LAMPUNG**
**BANDAR LAMPUNG**
**2023**

# ABSTRAK

## PERAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PEMBINAAN KEADABAN KEWARGANEGARAAN BAGI PEMUDA DI DESA BRAJA ASRI

**OLEH**

**YULIANTI PUSPITA DEWI**

Pemerintah desa sebagai *stakeholders* yang bertanggung jawab dalam mengembangkan potensi yang ada di desa salah satunya potensi sumber daya manusia. Pemuda menjadi komponen penting di desa sebagai mitra dari pemerintah desa untuk saling bekerja sama memajukan kesejahteraan desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan peranan pemerintah desa dalam melakukan upaya pembinaan keadaban kewarganegaraan bagi pemuda di Desa Braja Asri. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan dari pemerintah Desa Braja Asri melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan belum berjalan efektif dikarenakan pemerintah desa masih berfokus pada pembangunan fisik desa, kurangnya motivasi dari pemuda itu sendiri, kesibukan pribadi dari setiap pemuda, dan keterbatasan anggaran. Hal tersebut berpengaruh pada terhambatnya proses pengembangan aspek keadaban kewarganegaraan pada diri pemuda dimana karakter kewarganegaraan dan komitmen kewarganegaraan sebagai penopang terbentuknya keadaban kewarganegaraan belum terbentuk dengan baik, dikarenakan kurangnya komunikasi dan kerja sama antara sesama komponen yakni pemerintah desa dengan pemuda.

**Kata Kunci:** ***Peran, Pemerintah Desa, Pembinaan, Keadaban Kewarganegaraan, Pemuda***

## ABSTRACT

***THE ROLE OF VILLAGE GOVERNMENT OFFICIALS IN FOSTERING CIVIC VIRTUE TO YOUTH IN BRAJA ASRI VILLAGE***

**BY**

**YULIANTI PUSPITA DEWI**

*The village government as a stakeholders is responsible for developing the potential that exist in the village, one of which is the potential of human resources. Youth is an important component in the village as partners of the village government to work together to promote village welfare. The purpose of this study is to analyze and describe the role of the village government in conducting civic virtue to youth development in Braja Asri Village. The research method used is descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques in the field are carried out by means of observation, documentation, and interviews. Based on the results of the study, it shows that the implementation of the guidance from the Braja Asri village government through socialization and training activities has not been effective because the village government still focused on the physical development of the village, the lack of motivation and the youth themselves were personal activities of each youth, and budget constraints. This affects the delay in the process of developing aspects of civic virtue in youth and civic disposition and civic commitment as a support for the formation of civic virtue has not been formed properly due to the lack of communication between others, the village government with youth.*



**Keywords:** ***Role, Village Government, Fostering, Citizenship Civilization, Youth***

# PERAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PEMBINAAN KEADABAN KEWARGANEGARAAN *(CIVIC VIRTUE)* BAGI PEMUDA DI DESA BRAJA ASRI

Oleh

**YULIANTI PUSPITA DEWI**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar**

**SARJANA PENDIDIKAN**

**Pada**

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**
**Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**
**UNIVERSITAS LAMPUNG**
**BANDAR LAMPUNG**
**2023**

| | | |
|---|---|---|
| Judul Skripsi | : | **PERAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PEMBINAAN KEADABAN KEWARGANEGARAAN *(CIVIC VIRTUE)* BAGI PEMUDA DI DESA BRAJA ASRI** |
| Nama Mahasiswa | : | **Yulianti Puspita Dewi** |
| Nomor Pokok Mahasiswa | : | **1713032056** |
| Program Studi | : | **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan** |
| Jurusan | : | **Pendidikan IPS** |
| Fakultas | : | **Keguruan dan Ilmu Pendidikan** |

**MENYETUJUI**

Komisi Pembimbing

| Pembimbing I, | Pembimbing II, |
|---|---|
| **Drs. Berchah Pitoewas, M.H.** | **Dr. Muhammad Mona Adha, M.Pd.** |
| NIP 19611214 199303 1 001 | NIP 19791117 200501 1 002 |

**MENGETAHUI**

| Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | Ketua Program Studi Pendidikan PKn |
|---|---|
| **Drs. Tedi Rusman, M.Si.** | **Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.** |
| NIP 19600826 198603 1 001 | NIP 19870602 200812 2 001 |

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Berchah Pitoewas, M.H.**

Sekretaris : **Dr. Muhammad Mona Adha, M.Pd.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.**

2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

**Prof. Dr. Sunyono, M.Si.**
NIP. 19651230 199111 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **24 November 2022**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, adalah:

| | |
|---|---|
| Nama | : Yulianti Puspita Dewi |
| NPM | : 1713032056 |
| Program Studi | : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
| Jurusan | : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial |
| Fakultas | : Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
| Alamat | : Dusun VIII Divisi 1B Lakop Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Lampung |

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bandar lampung, 5 Februari 2023

Yulianti Puspita Dewi

NPM 1713032056

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Yulianti Puspita Dewi, dilahirkan di Kedondong pada tanggal 25 Juli 1998, yang merupakan putri pertama dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Mungin dan Ibu Nur Baiti (Almh).

Pendidikan formal yang telah diselesaikan penulis yaitu:

1. SD Xaverius Terbanggi Besar diselesaikan pada tahun 2011
2. SMP Xaverius Terbanggi Besar diselesaikan pada tahun 2014
3. SMA Negeri 1 Ambarawa diselesaikan pada tahun 2017

Pada tahun 2017 penulis diterima sebagai Mahasiswa Universitas Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bumi Nabung Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara dan mengikuti kegiatan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di SMA Yayasan Pembina (YP) Unila Bandar Lampung.

## MOTTO

***"Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui"***

***(Q.S. Al-Baqarah 216)***

***Karena,***

***"Boleh jadi keterlambatanmu dari suatu perjalanan adalah keselamatanmu"***

***(Yulianti Puspita Dewi)***

## PERSEMBAHAN

**Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang tidak akan pernah terhitung termasuk salah satunya pada karya kecilku ini yang akan ku persembahkan kepada:**

**Kedua orang tuaku tersayang Bapak Mungin dan Ibu Nur Baiti (Almh) yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidikku sampai saat ini.**

**Almamater tercinta Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Lampung.**

## SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Peran Aparatur Pemerintah Desa dalam Pembinaan Keadaban Kewarganegaraan *(Civic Virtue)* bagi Pemuda di Desa Braja Asri"**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung. Penyusunan skripsi ini tidaklah mudah, banyak hambatan yang datang baik dari luar maupun dari dalam diri penulis sendiri. Namun, berkat bimbingan, motivasi, arahan serta saran dari berbagai pihak skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Dengan demikian, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sunyono, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Riswandi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Albert Maydiantoro, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Umum Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. Tedi Rusman, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.P.d., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan Universitas Lampung dan Pembahas I saya, terima kasih atas saran dan masukannya.

7. Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H., selaku Pembimbing Akademik serta Pembimbing I saya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, sudah membimbing dengan penuh kesabaran, serta selalu memberikan arahan dan masukan yang membangun dalam penyusunan skripsi.
8. Bapak Dr. Muhammad Mona Adha, M.Pd., selaku Pembimbing II saya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, serta selalu memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi.
9. Bapak Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd., selaku Pembahas II saya, terima kasih atas saran dan masukannya.
10. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan.
11. Bapak Darusman selaku Kepala Desa Braja Asri, khususnya Bapak Anton Sujarwo selaku Kepala Seksi Pemerintahan, terima kasih untuk segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama melakukan penelitian.
12. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta Bapak Mungin dan Ibu Nur Baiti (Almh), terima kasih yang tidak terhingga atas segala pengorbanan dan perjuangan yang telah diberikan untuk membesarkan dan mendidikku. Terima kasih telah mengajarkan aku untuk menjadi pribadi yang mandiri dan kuat.
13. Teruntuk adikku tersayang yakni Halimah Ayu Aprilia, terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan. Semoga kita selalu kompak dan bisa menjadi kebanggaan orang tua.
14. Teruntuk sahabat terbaikku Wiwin Winarningsih, Vina Lestari, Astri Zahrotul Umami, dan Iin Indriyani, terima kasih selalu menjadi pendengar yang baik, mengajarkan begitu banyak hal dan berjuang bersama.
15. Teruntuk keluarga besar Bapak Saptak dan Ibu Suhaenah. Terima kasih karena sudah menerima penulis untuk tinggal selama melakukan penelitian dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
16. Teruntuk sahabat seperjuanganku, Anisa Sukma Mulyani, Retno Ayu Ningtyas, Anggun Purnama Sari, Vivi Ardila, Yulia Wahyu Saputri, Denti

Indah Sapitri, Tesalonika Dwi Putri, Retno Wardani, Mutiara Hanum, Sri Rahayu, dan Cici Indrawati. Terima kasih atas hari-hari yang telah kita lewati bersama, menjadi penolong di saat masa-masa sulit dan selalu meyakinkanku.

17. Seluruh keluarga besar PPKn angkatan 2017, terutama kelas genap. Terima kasih atas kebersamaan yang pernah kita lewati. Semoga kita semua bisa mengejar mimpi-mimpi yang kita harapkan.
18. Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Meskipun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung,  Juli 2022

**Yulianti Puspita Dewi**
**1713032056**

## DAFTAR ISI

**Halaman**

**HALAMAN JUDUL**

**ABSTRAK..... ii**

**LEMBAR PENGESAHAN..... v**

**LEMBAR PERNYATAAN ..... vii**

**RIWAYAT HIDUP..... viii**

**MOTTO ..... ix**

**PERSEMBAHAN ..... x**

**SANWACANA..... xi**

**DAFTAR ISI ..... xiv**

**DAFTAR TABEL ..... xvii**

**DAFTAR GAMBAR..... xviii**

**I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Fokus Penelitian ..... 8

C. Pertanyaan Penelitian ..... 8

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 9

E. Ruang Lingkup Penelitian ..... 10

## II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis ..... 11
1. Tinjauan Umum Tentang Peran ..... 11
2. Tinjauan Umum Tentang Aparatur Pemerintah Desa ..... 14
3. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan ..... 21
4. Tinjauan Tentang Pemuda ..... 23
5. Tinjauan Tentang *Civic Virtue* ..... 27
6. Tinjauan Perkembangan Moral Menurut Piaget ..... 37
B. Penelitian yang Relevan ..... 38
C. Kerangka Berpikir ..... 47

## III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian ..... 50
B. Subjek Penelitian atau Informan ..... 51
C. Data dan Sumber Data ..... 52
D. Lokasi Penelitian ..... 53
E. Informan dan Unit Analisis ..... 53
F. Instrumen Penelitian ..... 54
G. Kehadiran Peneliti ..... 54
H. Teknik Pengumpulan Data ..... 56
1. Observasi ..... 56
2. Wawancara ..... 57
3. Dokumentasi ..... 58
4. Studi Pustaka ..... 59
I. Uji Kredibilitas ..... 59
1. Perpanjangan Pengamatan ..... 59
2. Triangulasi ..... 59
3. Menggunakan Bahan Referensi ..... 60
4. *Member check* ..... 60
J. Teknik Pengolahan Data ..... 60
1. *Editing* ..... 60
2. *Tabulating* ..... 61

3. *Coding* ..... 61
4. Interpretasi Data ..... 61
K. Teknik Analisis Data ..... 61
1. Reduksi Data *(Data Reduction)* ..... 61
2. Penyajian Data *(Data Display)* ..... 62
3. Verifikasi *(Conclution Drawing)* ..... 62
L. Rencana Penelitian ..... 63
M. Tahap Penelitian ..... 64

**IV. PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..... 66
1. Sejarah Desa Braja Asri ..... 66
2. Gambaran Umum Desa Braja Asri ..... 68
B. Deskripsi Hasil Penelitian ..... 71
1. Penjabaran Hasil Penelitian ..... 71
a. Peran Aparatur Desa dalam Upaya Pembinaan Pemuda di Desa Braja Asri ..... 71
b. Upaya Pembentukan Keadaban Kewarganegaraan *(Civic Virtue)* pada Pemuda ..... 74
2. Temuan Hasil Penelitian ..... 85
3. Pembahasan Hasil Penelitian ..... 88
a. Pembinaan Penyadaran dan Pembentukan Perilaku (Pembinaan Pengetahuan) ..... 89
b. Pembinaan Transformasi Kemampuan ..... 91
c. Pembinaan Keterampilan ..... 92
4. Keunikan Hasil Penelitian ..... 100

**V. KESIMPULAN**

A. Simpulan ..... 102
B. Sara ..... 103

**DAFTAR PUSTAKA**

# DAFTAR TABEL

**Halaman**

Tabel 1 Data Penduduk Desa Braja Asri Berdasarkan Usia ..... 4
Tabel 1 Faktor Penghambat Partisipasi Pemuda Desa Braja Asri..... 7
Tabel 3 Informan dan Unit Analisis ..... 54
Tabel 4 Kehadiran Peneliti..... 55
Tabel 5 Susunan Kepala Desa dari Tahun 1957-2022..... 67
Tabel 6 Susunan Kepala Dusun..... 69
Tabel 7 Jumlah Penduduk ..... 69
Tabel 8 Sarana Ibadah Desa Braja Asri Tahun 2020..... 70
Tabel 9 Tingkat Pendidikan ..... 70

# DAFTAR GAMBAR

**Halaman**

Gambar 1 Kerangka Berpikir ..... 49
Gambar 2 Rencana Penelitian ..... 63

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Observasi
2. Transkip Lembar Observasi
3. Pedoman Wawancara
4. Pertanyaan Wawancara
5. Sebaran Pertanyaan Wawancara
6. Transkip Wawancara
7. Pedoman Dokumentasi
8. Dokumentasi Wawancara
9. Dokumentasi Data Desa Braja Asri
10. Surat Pernyataan Wawancara
11. Surat Rencana Judul Skripsi
12. Surat Izin Penelitian Pendahuluan
13. Surat Penelitian
14. Surat Keterangan Penelitian
15. Surat Balasan Penelitian

# I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan salah satu sub sistem yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Landasan pemikiran tersebut berdasarkan pada pengaturan mengenai pemerintahan desa yakni keanekaragaman, partisipasi, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa berhak untuk mengurus daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakat, dengan demikian proses pertumbuhan demokrasi diharapkan semakin baik. Hal ini juga telah membuka ruang untuk pemberdayaan pemerintah desa agar dapat mengembangkan daerah yang dipimpinnya.

Keberhasilan pembangunan nasional dipengaruhi oleh kemajuan pemerintahan di desa dikarenakan pemerintah desa merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang memiliki peran strategis dalam pengaturan masyarakat di desa. Pihak penyelenggara pemerintahan desa terdiri dari unsur kepala desa dan perangkat desa yakni sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis yang masing-masing memiliki tugas dan perannya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa *"Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa"*. Adanya peraturan tentang pemerintah desa bertujuan agar dalam melaksanakan perannya, pemerintah desa memiliki ketentuan sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.

Peran dari aparatur pemerintah desa sangat penting di suatu wilayah karena mereka merupakan *stakeholders* sebagai penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta melakukan pembinaan pemuda di desa. Aparatur desa dituntut untuk dapat profesional dan tanggap terhadap kebutuhan dari masyarakatnya. Tidak hanya dari aparatur desa, tetapi juga perlu adanya keikutsertaan dari para masyarakat untuk mendorong peduli terhadap desanya sehingga tujuan desa dapat dicapai secara optimal.

Upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih demokratis, pemuda menjadi perhatian utama dikarenakan pemuda merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam melakukan perubahan untuk memajukan suatu bangsa. Sebagai penentu arah perkembangan dan masa depan bangsa, diperlukan pembinaan terhadap pemuda agar memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap diri sendiri, sosial, maupun masyarakat. Pemuda dapat berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam pembangunan dengan baik. Pembinaan perlu untuk dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan suasana kepemudaan yang sehat serta tanggap terhadap pembangunan masa depan yang akan meningkatkan kualitas pemuda yang berdaya guna di tengah dinamika zaman yang pesat (Pratama dan Rahmat, 2018: 171).

Penyelenggara pemerintahan desa terus berupaya dalam melakukan pembinaan kepada para pemuda agar mereka dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya ke arah yang lebih positif. Kepala desa selaku pemimpin beserta struktur organisasi di bawahnya yakni kepala seksi pemerintahan desa menjadi penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan di desa yang memiliki fungsi salah satunya yakni melakukan pemberdayaan masyarakat seperti melakukan tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang kepemudaan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan pembinaan pada organisasi kepemudaan karang taruna yang ada di desa. Keberadaan karang taruna hendaknya dapat membina pemuda sebagai warga negara muda khususnya yang ada di pedesaan, membina para pemuda agar

mampu mengembangkan potensi yang mereka miliki sehingga dapat menciptakan kehidupan sosial yang lebih baik di masa mendatang.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam melakukan pembinaan kepemudaan ini diharapkan agar para pemuda mempunyai keinginan untuk ikut turut serta dalam setiap kegiatan program yang ada di desa. Menurut United Nations (1956, h.83-92 dalam Ulumiyah, dkk. 2013: 894) tujuan utama dilakukannya pembinaan adalah membangun rasa percaya diri para pemuda dan rasa percaya diri merupakan modal utama untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat. Pembinaan berupaya sosialisasi, kegiatan pelatihan atau *workshop* dapat memberikan pemahaman baru kepada para pemuda serta cara berpikir dalam memandang suatu hal. Berdasarkan pendapat tersebut maka tujuan dari pemerintah desa melakukan pembinaan khususnya pada warga negara muda yaitu agar mereka bisa menjadi mandiri dan mampu menyokong dirinya agar tidak terjatuh ke dalam posisi negatif.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan kepemudaan seperti potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Beberapa hal tersebut harus dibina dan dikembangkan agar bermanfaat untuk dirinya dan lingkungannya. Partisipasi pemuda di masyarakat sangat diperlukan guna membangun kehidupan sosial masyarakat yang lebih baik. Mereka dapat berperan serta dalam suatu usaha bersama dengan masyarakat untuk kepentingan bersama. Berikut ini disajikan data penduduk Desa Braja Asri berdasarkan usianya:

**Tabel 1 Data Penduduk Desa Braja Asri Berdasarkan Usia**

| No. | INDIKATOR | JUMLAH | |
|---|---|---|---|
| | | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 |
| 1 | 0 – 5 tahun | 310 orang | 421 orang |
| 2 | 6 – 15 tahun | 1276 orang | 1401 orang |
| 3 | 16 – 60 tahun | 2465 orang | 2660 orang |
| 4 | 60 tahun keatas | 298 orang | 315 orang |
| JUMLAH | | 4349 orang | 4797 orang |

**Sumber: Data Sekretariat Desa Braja Asri Tahun 2019-2020**

Jumlah usia generasi muda mengalami peningkatan dari tahun 2019-2020. Hal ini bisa dimaknai bahwa begitu banyak potensi yang seharusnya bisa dikembangkan. Banyaknya jumlah usia produktif dapat berpengaruh pada tingkat partisipasi dan keterlibatan para generasi muda dalam lingkungan masyarakat di Desa Braja Asri. Pada dasarnya upaya pembinaan tidak hanya sebatas tanggung jawab masyarakat semata tetapi secara normatif merupakan tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat. Adanya organisasi kepemudaan karang taruna di desa sangat penting dalam upaya pemberdayaan pemuda untuk memupuk rasa kepedulian, nasionalisme, mengembangkan kemampuan, minat, bakat, dan penanggulangan hal-hal negatif. Sesuai dengan pendapat dari Umberto Sihombing bahwa ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keunggulan kompetitif sangat diperlukan untuk memasuki era baru (Trisnani, 2014: 1). Pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan berbasis komunitas kepedulian dan kepekaan terhadap lingkungan akan semakin terarah sehingga mampu menampilkan kemampuannya terlebih membawa lingkungan sekitarnya menjadi lebih maju.

Kesadaran pemuda untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungannya serta perubahan sosial merupakan hal yang harus dimiliki oleh para pemuda. Memiliki kesadaran dalam diri akan kepentingan umum yang perlu untuk diperhatikan daripada kepentingan pribadinya atau golongan saja. Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Ketika para pemuda mempunyai kesadaran dan komitmen akan kepentingan serta permasalahan umum menjadi bagian dari tanggung jawab mereka maka itu menandakan bahwa para pemuda memiliki *civic virtue* (keadaban kewarganegaraan) yang baik. Pemuda perlu untuk mengesampingkan ego diri dan menumbuhkan empati pada masyarakat.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya mengenai *civic virtue,* bahwa *civic virtue* berkembang dengan baik di masyarakat Desa Balun yang tercermin dari kepedulian terhadap masyarakat lain di sekitarnya, toleransi terhadap keberagaman sangat tinggi, warga yang beragama minoritas memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan dan partisipasi politik misalnya ketika melaksanakan pemilu, serta keterlibatan masyarakat secara langsung dalam berbagai macam kegiatan seperti kegiatan keagamaan (Hidayati dan Harmanto, 2017: 106). Hal tersebut dapat diartikan bahwa masyarakat memiliki kesadaran dan pemahaman akan toleransi dan kerja sama demi mempererat persatuan dan kesatuan.

Studi yang juga dilakukan oleh James B. Hoesterey (2012) dari Universitas Michigan tentang *civic virtue* (kebajikan/ keadaban kewarganegaraan) di Indonesia yang ditinjau dari Kosmopolitanisme Profetik antara Islam dan Psikologi Populer di Indonesia bahwa sebagai seorang relawan sipil (Gema Nusa), setiap individu harus mampu menjadi teladan moral yang baik, harus mampu mengatasi perbedaan agama di negara Indonesia yang plural, dan memberikan pelayanan yang setia pada masyarakat. Menurut Gymnastiar dalam (Hoesterey, 2012: 50), pengetahuan diri dan disiplin etika adalah kunci kebajikan sipil di Indonesia.

Keadaban kewarganegaraan *(civic virtue)* mengandung nilai pengorbanan sehingga setiap warga negara mengabdi untuk kesejahteraan bersama dengan mengorbankan kepentingan pribadi. Mendorong warga negara untuk berpartisipasi dalam lingkungan kehidupan sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi perubahan dalam masyarakat ke arah yang lebih baik. Menciptakan kehidupan bermasyarakat yang lebih demokratis merupakan

tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan, maka dari itu upaya pemerintah desa dan perangkatnya sebagai fasilitator dan motivator untuk membina serta mendukung kegiatan kepemudaan adalah hal yang penting. Hal tersebut guna menciptakan pemuda yang adaptif dan tidak apatis terhadap lingkungannya sesuai dengan tujuan pembentukan kewarganegaraan yang memiliki kebajikan.

Pemuda Indonesia yang terjadi di lapangan saat ini cenderung bersikap apatis terhadap apa yang sedang terjadi pada masyarakat sekitar. Kecenderungan untuk lebih mementingkan diri sendiri, kelompoknya dan sikap cari gampang dinilai lebih menguntungkan daripada harus bersusah payah memedulikan apa yang terjadi pada lingkungan sekitar dan rakyat Indonesia. Adanya pergeseran perilaku pemuda Indonesia tidak terlepas dari pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi informasi komunikasi yang menyebabkan tumbuh berkembang dan menyebarluasnya sifat individualisme. Hanya sedikit pemuda yang dapat berkontribusi dalam peranannya sebagai agen perubahan dan kontrol sosial, juga dengan hakikat mereka sebagai makhluk sosial yang menekankan pada tanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan (Suseno, 2015).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada saat pra penelitian kepada beberapa pemuda di Desa Braja Asri, ditinjau dari segi bentuk peranan aparatur pemerintah desa yakni tugas dan fungsinya dalam melakukan pembinaan kepada para pemuda belum optimal karena aparatur pemerintah belum menjalin kerja sama dan koordinasi yang baik terhadap pemuda sehingga pemuda tidak tergerak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Selain itu, keterlibatan pemuda dalam organisasi kepemudaan sebagai wadah pembinaan tergolong rendah, pemuda cenderung hanya aktif dalam kegiatan olah raga dan sosial kemasyarakatan seperti gotong royong membersihkan jalan, masjid, dan lingkungan sekitar.

Peran dari aparatur desa dan partisipasi pemuda yang secara umum terlihat kurang baik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor penghambat dapat

menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap suatu proses kegiatan yang akan dijalankan. Berikut disajikan tabel faktor yang menghambat keikutsertaan para pemuda untuk berpartisipasi dalam kegiatan:

**Tabel 2 Faktor Penghambat Partisipasi Pemuda Desa Braja Asri**

| No. | Faktor Penghambat |
|---|---|
| 1. | Keterbatasan waktu dari tiap individu sehingga kurang maksimal dalam berpartisipasi |
| 2. | Kesibukan masing-masing individu dikarenakan bekerja dan melakukan kegiatan lainnya |
| 3. | Adanya rasa kurang percaya diri untuk menyalurkan potensi yang dimiliki |
| 4. | Keterbatasan dana (finansial) |
| 5. | Kurang motivasi dalam diri setiap individu untuk ikut serta dalam kegiatan |

**Sumber: Hasil Wawancara dengan Pemuda Desa Braja Asri**

Faktor-faktor tersebut menjadi penghalang pelaksanaan pembinaan dari aparatur desa untuk membentuk pemuda yang adaptif terhadap diri sendiri dan masyarakat di lingkungannya. Tantangan yang dihadapi oleh aparatur desa yang sesuai dengan kondisi para pemuda sangat tergantung pada upaya-upaya peningkatan partisipasi masyarakat yang saat ini masih kurang. Padahal pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan menjadi pendorong untuk mengembangkan tanggung jawab serta partisipasi pemuda dalam setiap pelibatan di masyarakat dalam rangka membentuk pemuda yang memiliki nilai-nilai keadaban kewarganegaraan *(civic virtue)* di tengah masyarakat multikultural.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian berkenaan dengan judul “Peran Aparatur Pemerintah Desa dalam Pembinaan Keadaban Kewarganegaraan *(Civic Virtue)* Pemuda di Desa Braja Asri”. Aparatur desa menjadi aktor yang memiliki tanggung jawab besar untuk saling bekerja sama meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa yang dipimpinnya. Aparatur desa tentu dinilai memiliki nilai-nilai keadaban karena mereka mampu menempatkan kepentingan bersama terutama perhatiannya pada masyarakat daripada kepentingan pribadinya saja. Selain itu juga aparatur desa mampu lebih memahami kondisi masyarakatnya yang beragam. Sehingga diharapkan

adanya dukungan berupa pembinaan terhadap para pemuda agar nilai-nilai keadaban kewarganegaraan dalam diri mereka dapat terbentuk. Nilai-nilai kebajikan yang peneliti ingin kaji berkaitan dengan kesadaran dan komitmen dari para pemuda terhadap peran yang seharusnya mereka laksanakan, serta tanggung jawab dan kepeduliannya terhadap lingkungan di sekitarnya. Pengembangan nilai-nilai kebajikan tersebut dalam rangka membentuk kehidupan masyarakat yang demokratis atau dikenal dengan masyarakat madani *(civil society)*.

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, fokus penelitian ini meliputi:

1. Peran aparatur pemerintah desa dalam melakukan pembinaan kepemudaan di Desa Braja Asri.
2. Pembentukan keadaban kewarganegarann *(civic virtue)* pada pemuda di Desa Braja Asri.

## C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas pertanyaan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran aparatur pemerintah desa dalam melakukan pembinaan kepemudaan di Desa Braja Asri?
2. Bagaimana pembentukan keadaban kewarganegarann *(civic virtue)* pada pemuda setelah dilakukan pembinaan oleh aparatur Desa Braja Asri ?

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk memberikan gambaran mendalam tentang peran penyelenggara pemerintah desa dalam melakukan pembinaan kepemudaan sebagai dasar untuk membentuk pemuda yang memiliki kebajikan/keadaban kewarganegaraan *(civic virtue)* yang direpresentasikan melalui pemerintah Desa Braja Asri Kecamatan Way Jepara.

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi para peneliti pada bidang kajian ilmu sosial, khususnya studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dimensi sosial guna memberikan tambahan pengetahuan secara luas dan mendalam mengenai isu-isu sosial pemuda dan masyarakat.

#### b. Kegunaan Praktis

1) Sebagai bahan informasi dan evaluasi pemerintah desa agar dapat menjalankan perannya yang sangat sentral serta krusial sebagai penyelenggara dan pihak yang sangat dekat dengan pemuda dalam rangka mewujudkan tanggung jawab sosial yang berlandaskan kepedulian, rasa empati, nilai dan moral, inisiatif serta partisipasi dalam kegiatan bermasyarakat.
2) Sebagai bahan informasi bagi para pemuda agar dapat memaksimalkan potensi diri melalui kegiatan positif yang berguna bagi lingkungan sekitar serta memahami sekaligus menyadari bagaimana pentingnya peran serta mereka dalam masyarakat.

## E. Ruang Lingkup Penelitian

### 1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup penelitian ini adalah termasuk ruang lingkup politik dan kenegaraan, karena mengkaji mengenai peran serta partisipasi warga negara dalam melakukan pembinaan guna membentuk kehidupan masyarakat demokratis.

### 2. Ruang Lingkup Subjek

Subjek dalam penelitian ini adalah kepala Desa Braja Asri, sekretaris desa, kepala dusun, dan pemuda Desa Braja Asri.

### 3. Ruang Lingkup Objek

Ruang lingkup objek penelitian ini ialah peranan aparatur Desa Braja Asri dalam mengembangkan *civic virtue* pemuda.

### 4. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah penelitian ini dilaksanakan di Desa Braja Asri, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Lampung.

### 5. Ruang Lingkup Waktu

Pelaksanaan penelitian ini dimulai sejak dikeluarkannya surat izin penenelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada tanggal 24 Juli 2020 dengan Nomor **5225/UN26.13/PN.01.00/2020** sampai pada tanggal 31 Mei 2022.

# II. TINJAUAN PUSTAKA

## A. Deskripsi Teoritis

Deskripsi teori merupakan penjelasan secara sistematis mengenai teori yang termasuk di dalamnya pendapat para pakar ahli dan penulis serta hasil penelitian-penelitian yang relevan dengan variabel yang akan diteliti dalam penelitian. Deskripsi teori ini berisi penjabaran mengenai variabel-variabel yang akan diteliti melalui pendefinisian dari berbagai referensi yang relevan.

### 1. Tinjauan Umum Tentang Peran

#### a. Pengertian Peran

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) (Soekanto, 2017: 212). Selain itu, menurut Slamet dalam (Oktaviani dkk., 2019: 114), menyatakan bahwa peran adalah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati posisi di dalam status sosial. Peran dapat dimaknai sebagai suatu tindakan atau perilaku seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Hakikat peran dapat diartikan sebagai suatu rangkaian tertentu yang ditimbulkan oleh kedudukan seseorang. Pentingnya peranan dalam masyarakat adalah karena ia mengatur perilaku seseorang, jadi orang yang bersangkutan akan menyesuaikan perilaku sendiri dengan orang-orang sekelompoknya sesuai dengan harapan masyarakat.

Paparan di atas dapat disimpulkan bahwa teori peran merupakan teori yang berbicara mengenai posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada

dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran dalam penelitian ini yaitu para aparatur pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis seperti kepala dusun menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang pelaku peran berusaha untuk bertindak sesuai dengan harapan yang ada dalam masyarakat.

**b. Aspek-aspek Peran**

Teori peran Biddle dan Thomas (Sarwono, 2015: 215), membagi peran menjadi empat golongan, yakni:

1) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
   Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu sebagai berikut:
   a) Aktor atau pelaku, yakni orang yang sedang berperilaku melaksanakan suatu peran tertentu.
   b) Target atau sasaran, yakni orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya. Baik aktor maupun target ini bisa dalam bentuk individu maupun kelompok.
2) Perilaku yang muncul dalam interaksi
   Biddle dan Thomas membagi perilaku menjadi empat indikator dalam kaitannya dengan peran, yaitu sebagai berikut:
   a) Harapan tentang peran *(expectation)*
      Harapan disini artinya kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan orang lain terhadap perilaku atau tindakan yang pantas atau yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang memiliki peran tertentu. Harapan ini bisa berlaku secara umum, dan bisa juga merupakan harapan dari segolongan orang saja, atau juga bisa harapan dari satu orang tertentu.

b) Norma *(norm)*

Norma merupakan salah satu bentuk harapan. Ada dua jenis harapan yakni harapan yang bersifat antisipasi artinya keharusan yang menyertai suatu perilaku yang akan terjadi, dan harapan normatif artinya keharusan yang menyertai peran.

c) Wujud perilaku dalam peran *(performance)*

Peran diwujudkan dalam perilaku atau tindakan oleh aktor, dan dilihat wujudnya dari tujuan dasarnya atau hasil akhirnya. Perwujudan peran bervariasi dan berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain.

d) Penilaian *(evaluation)* dan sanksi *(sanction)*

Biddle dan Thomas mengatakan bahwa penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Penilaian peran adalah kesan baik positif maupun negatif yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma yang berlaku terhadap suatu perilaku yang dilakukan oleh aktor. Sanksi disini diartikan sebagai usaha yang dilakukan seorang aktor dalam mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga hak yang tadinya dinilai negatif berubah menjadi positif.

3) Kedudukan dan perilaku orang dalam peran

Kedudukan adalah sekumpulan orang yang secara bersama-sama (kolektif) diakui perbedaannya dari kelompok yang lain berdasarkan sifat-sifat yang mereka miliki bersama, perilaku yang sama-sama mereka perbuat dan reaksi orang-orang lain terhadap mereka bersama (Sarwono, 2015: 216-218).

4) Kaitan antara orang dan perilaku

Perilaku merupakan perwujudan dari sikap seseorang untuk membawa dirinya pada suatu kondisi dimana individu tersebut

melakukan sesuatu sesuai dengan cara berpikir, serta merasakan keinginan untuk bertindak.

Teori peran digunakan sebagai kerangka deskriptif terhadap tindakan dan perilaku aparatur Desa Braja Asri. Tindakan dan perilaku mereka dilukiskan dalam konteks posisi sosial yang mereka miliki di Desa Braja Asri sebagai penyelenggara pemerintahan yang ada di desa. Melihat sumber daya manusia yang ada di Desa Braja Asri khususnya para pemuda agar mendapatkan perhatian lebih agar mampu mengembangkan potensinya. Peran aparatur desa dalam hal ini adalah sebagai agen penggerak pemuda Desa Braja Asri mampu mendorong partisipasi seluruh elemen pemuda agar mampu membangun kesadaran serta tanggung jawab untuk lebih berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Partisipasi dari pemuda di masyarakat sangat erat kaitannya dengan keterlibatan mereka dalam segala kegiatan yang diadakan oleh aparatur desa melalui upaya pembinaan dan pemberdayaan misal dengan adanya karang taruna sebagai wadah organisasi yang strategis, misalnya dengan keterlibatan serta partisipasi mereka dalam membantu kegiatan kerja bakti, keikutsertaan dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan, partisipasi dalam perumusan kebijakan publik (peraturan desa), dan partisipasi dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah desa juga bertanggung jawab dalam memperkuat wawasan kebangsaan pada pemuda, membangkitkan kesadaran atas hak dan kewajiban pemuda sebagai warga negara, dan membangkitkan sikap kritis pemuda terhadap penegakan hukum.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Aparatur Pemerintah Desa

### a. Pengertian Pemerintah Desa

Pemerintah desa sebagai lembaga perpanjangan tangan pemerintah pusat yang berkedudukan di desa mempunyai kedudukan yang sangat

dekat dengan masyarakat. Menurut Belaya (2019: 2) yang dipahami sebagai pemerintah desa yakni kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli, demokratisi dan pemberdayaan masyarakat di mana berkedudukan di desa/ kelurahan dan menjadi salah satu penentu keberhasilan pembangunan nasional. Disebut dengan masyarakat hukum dikarenakan perannya yang sangat strategis maka perlu adanya peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintah desa, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan optimal.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 6 Ayat (3) dijelaskan bahwa *"Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa".* Dalam hal ini maka roda pemerintahan desa beserta kepentingan masyarakat setempat dipimpin oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretaris desa, kepala urusan (kaur umum, kaur pembangunan, kaur kesra, dan kaur keuangan), dan kepala dusun. Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Silalahi, 2018: 12).

Pemerintah desa dapat disimpulkan sebagai lembaga yang menjalani roda pemerintahan di desa yang di dalamnya terdiri dari kepala desa dan dibantu oleh beberapa perangkat desa yang memiliki tugas serta kewenangannya masing-masing demi terwujudnya masyarakat desa yang produktif. Pelaksanaan tugas oleh pemerintah desa disesuaikan dengan asas yang telah ditetapkan yakni desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas pembantuan dimana pemerintah desa juga menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan terhadap masyarakat.

**b. Pengertian Aparatur Pemerintah Desa**

Aparatur dapat diartikan sebagai pegawai negeri atau seperangkat sistem yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola kekuasaannya atau semua perangkat yang digunakan oleh pemerintah untuk menerapkan kekuasaan pada masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 1 Ayat (5) disebutkan bahwa,

> *"Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretaris desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan"*.

Aparatur desa meliputi semua orang/ pihak yang terlibat dalam urusan pemerintahan desa.

**1) Kepala Desa**

Kepala Desa menjadi kepala pemerintahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat yang dekat dengan masyarakat. Tugas kepala desa yakni menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat (2) disebutkan mengenai wewenang kepala desa yakni sebagai berikut:

a) memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa,
b) mengangkat dan memberhentikan perangkat desa,
c) memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa,
d) menetapkan peraturan desa,
e) menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa,
f) membina kehidupan masyarakat desa,
g) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa,

h) membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa,
i) mengembangkan sumber pendapatan desa,
j) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,
k) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa,
l) memanfaatkan teknologi tepat guna,
m) mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif,
n) mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
o) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala desa juga memiliki beberapa kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 Ayat (4) yaitu:

a) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika,
b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,
c) memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa,
d) menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan,
e) melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender,
f) melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme,

g) menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa,
h) menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik,
i) mengelola keuangan dan aset desa,
j) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa,
k) menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa,
l) mengembangkan perekonomian masyarakat desa,
m) membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa,
n) memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa,
o) mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan
p) memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Pasal 6 Ayat (3), kepala desa untuk melaksanakan tugas tugasnya memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

a) menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah,
b) melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan,
c) pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan,

d) pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna,
e) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

**2) Sekretaris Desa**

Sekretaris desa merupakan aparat yang bertugas dalam bidang administrasi. Dalam Rakasiwi, 2017: 17 dijelaskan bahwa sekretaris desa melaksanakan tugas khususnya membantu pemerintahan desa di bidang administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat desa serta masyarakat. Sebagaimana dijelaskan mengenai tugas dan fungsi sekretaris desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 yaitu:

a) melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi,
b) melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum,
c) melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengluaran, verifikasi, administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya,
d) melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

**3) Pelaksana Kewilayahan**

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan, dan disesuaikan dengan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan dapat disebut juga sebagai kepala dusun atau sebutan lain sesuai dengan wilayahnya. Kelancaran jalannya pemerintahan di desa dapat terwujud dengan membentuk dusun yang dikepalai oleh kepala dusun.

Kepala dusun adalah unsur pelaksana tugas kepala desa dengan wilayah kerja tertentu, dimana pada suatu desa terdiri dari beberapa dusun dan di setiap dusun terdiri dari beberapa RT dan RW. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015, ada beberapa fungsi dari kepala kewilayahan/ kepala dusun yakni:

a) pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah,
b) mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya,
c) melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya,
d) melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

**4) Pelaksana Teknis**

Pelaksana teknis merupakan aparat yang membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional dan bersifat teknis, seperti seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan. Kepala seksi memiliki beberapa fungsi yang diatur dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Pasal 9 Ayat (3) sebagai berikut:

a) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa,
b) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan karang taruna,
c) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipsi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

## 3. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan

### a. Konsep Pembinaan

Pembinaan berasal dari kata dasar *"bina"* yang artinya membangun sesuatu supaya lebih baik. Warner Bruke dan Harvey Hornstein dalam Yeyet (2019: 262) menjelaskan bahwa pembinaan adalah suatu proses perubahan yang terencana, dimana perubahan tersebut berkaitan dengan perubahan kultur organisasi dari suatu keadaan untuk menghindari pengujian proses sosial (terutama pengambilan keputusan, perencanaan, dan komunikasi) ke dalam suatu keadaan. Pembinaan ini harus disusun secara terencana yang ditujukan untuk menyejahterakan masing-masing individu. Menurut Payne dalam Putra

dan Pratama (2010: 10), pemberdayaan merupakan suatu proses dan upaya untuk membantu masyarakat mendapatkan daya, kekuatan, kemampuan, untuk mengambil keputusan dan tindakan termasuk mengurangi kendala pribadi dan sosial dalam mengambil keputusan tindakan tersebut.

Membuat masyarakat terutama pemuda yang menjadi subjek dalam penelitian ini agar mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupan sendiri, artinya mereka memiliki pemahaman, mampu bekerja sama, mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari informasi dan menyaring informasi, serta mampu bertindak sesuai inisiatif. Makna pembinaan dari beberapa pernyataan di atas dapat disintesiskan sebagai proses atau upaya untuk membuat suatu lebih berdaya atau lebih baik, terutama dalam tatanan masyarakat supaya memiliki tatanan nilai dan budaya sebagai individu dan masyarakat.

Proses pembinaan memiliki makna kesetaraan, adil, dan demokratis tanpa adanya tekanan atau dominasi. Oos M. Anwas (2013: 50) mengemukakan terdapat empat indikator dari pembinaan yaitu :

1) Merupakan kegiatan yang terencana dan kolektif
2) Memperbaiki kehidupan masyarakat
3) Prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung
4) Dilakukan melalui program peningkatan kapasitas.

**b. Tahapan Pembinaan**

Pembinaan menekankan pada proses, bukan semata-mata hasilnya. Oleh karena itu, indikator keberhasilan pembinaan adalah seberapa besar partisipasi dari individu atau masyarakat. Menurut Sulistiyani (2014: 83-84), pembinaan memiliki beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merata membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan. Hal tersebut menjadi prinsip agar seorang individu dapat mengambil peran ketika memiliki wawasan yang terbuka disertai keterampilan dasar yang baik.
3) Tahap keterampilan intelektual, kecakapan keterampilan, sehingga terbentuklah inisiatif dan keterampilan mandiri.

## 4. Tinjauan Tentang Pemuda

### a. Definisi Pemuda

Pemuda adalah penduduk yang berusia 15-35 tahun, yaitu mereka yang diidealkan sebagai sosok yang penuh energi, semangat, dan kreativitas untuk menciptakan semangat pembaharuan (Syukur dalam Kawalod dkk., 2015: 2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Prawira (2019: 19), dalam usaha untuk meneruskan perjuangan generasi sebelumnya dan mewujudkan cita-cita bangsa, pemuda harus memiliki karakter yang baik, diantaranya: memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformasi, dan futuristik. Pada dasarnya pemuda sangat erat kaitannya dengan potensi dalam dirinya yang harus bisa dikembangkan dan dimanfaatkan ke arah yang positif.

Warga negara yang baik menurut Aziz Wahab (Sofyan dan Sundawa, 2015: 185) adalah warga negara yang mampu memahami dan mampu melaksanakan dengan baik hak-hak dan kewajibannya sebagai individu yang memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial, mampu memecahkan masalah-masalahnya sendiri dan juga permasalahan

masyarakat secara cerdas sesuai dengan fungsi dan perannya, memiliki sikap disiplin diri, mampu berpikir kritis kreatif, dan inovatif agar mencapai kualitas pribadi warga negara dan warga masyarakat yang baik. Pemuda dapat dimaknai sebagai generasi yang menopang tanggung jawab besar pada keberlangsungan negara harus mampu melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik di tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai warga negara yang baik.

**b. Peran Pemuda**

Mengasah daya kepeloporan serta peran aktif pemuda dalam masyarakat, pemuda harus diberi stimulan berupa kesempatan yang sebesar-besarnya dalam organisasi-organisasi misalnya organisasi kepemudaan karang taruna. Kegiatan beroganisasi inilah mental, ketangguhan, dan sumbangsih pemikiran pemuda dapat diasah melalui program-program nyata di organisasi tersebut.

Berdasarkan paparan di atas serta kodrat pemuda yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam komitmennya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta sikap dan komitmen kepada masyarakat maka pemuda adalah elemen bangsa yang menyandang peran sebagai agen perubahan *(agent of change)* dan agen kontrol sosial *(agent of social control).*

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Pasal 17 Ayat (1), peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan:

1) Menumbuh kembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
2) Memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual; dan/atau
3) Meningkatkan kesadaran hukum.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Pasal 17 Ayat (2), peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial diwujudkan dengan:

1) Memperkuat wawasan kebangsaan;
2) Membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
3) Membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
4) Meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
5) Menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
6) Memberikan kemudahan akses informasi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan Pasal 17 Ayat (3), peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan:

1) Pendidikan politik dan demokratisasi;
2) Sumber daya ekonomi;
3) Kepedulian terhadap masyarakat;
4) Ilmu pengetahuan dan teknologi;
5) Olah raga, seni, dan budaya;
6) Kepedulian terhadap lingkungan hidup;
7) Pendidikan kewirausahaan; dan/atau
8) Kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Peranan pemuda seperti yang dicita-citakan oleh pemerintah melalui undang-undang tersebut tentu selaras dengan upaya pembentukan pemuda yang memiliki nilai-nilai kebajikan kewarganegaraan yang salah satunya diimplementasikan melalui partisipasi aktif melalui kegiatan di masyarakat dan tergabung dalam organisasi kepemudaan karang taruna sebagai salah satu wadah yang dapat memfasilitasi minat pemuda.

**c. Peran Aparatur Desa dalam Pembinaan Pemuda**

Pemerintah dan komponen masyarakat lainnya perlu untuk bekerja sama dalam membantu generasi muda guna mengembangkan potensinya serta membantu mewujudkan kesadaran dan tanggung jawab generasi muda terhadap permasalahan sosial baik yang bersifat preventif maupun rehabilitatif. Pengembangan guna meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda seharusnya dilaksanakan secara komprehensif, terpadu, terarah, dan berkesinambungan.

Keterlibatan pemerintah, pemuda, dan sinergi dengan masyarakat dalam pembinaan bertujuan untuk memberikan motivasi serta mengarahkan agar nantinya dapat mencapai hasil yang lebih baik. Pembinaan dapat membantu mengembangkan dan mendapatkan kecakapan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan. Berpartisipasi aktif merupakan pribadi yang mampu bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, kegiatan partisipasi secara aktif berarti seseorang secara terus menerus mampu mengembangkan keterampilan sosial dan kompetensi kewarganegaraannya (Adha, 2019: 3).

Mangunhardjana (Anggara, 2020) mengungkapkan untuk melakukan pembinaan ada beberapa yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut:

1) Pembinaan Pengetahuan

   Pembinaan ini menjalankan program dengan menyampaikan informasi kepada sasaran, misalnya dengan sosialisasi. Kegiatan ini berfungsi untuk memberikan pemahaman kepada pihak yang dibina, pemahaman tersebut bersifat luas seperti pemahaman tentang diri yang dibina, tentang masalahnya, dan tentang lingkungan yang lebih luas.

2) Pembinaan dan Pengembangan Sikap

   Pembinaan karakter berupaya menjadikan seseorang sadar akan tanggung jawab diri yang berhubungan dengan karakter warga

negara yang baik *(good citizen).* Dengan dilakukannya pembinaan maka diharapkan terciptanya tindakan-tindakan yang kurang baik dapat dicegah, sehingga pemuda dapat terhindar dari masalah-masalah yang dapat menghambat perkembangan. Pembinaan ini berguna untuk membantu seseorang agar mengenal dan mengembangkan dirinya secara benar.

3) Pembinaan Keterampilan

Pembinaan keterampilan diberikan bertujuan agar dapat membantu pihak yang dibina dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantap terarah dan berkelanjutan. Pembinaan ini menjadikan seseorang sadar akan peran dirinya dalam kehidupannya yang memiliki wawasan, pandangan, dan keterampilan yang tepat berkenaan dengan diri sendiri dan lingkungan.

## 5. Tinjauan Tentang *Civic Virtue*

### a. Definisi *Civic Virtue*

*Civic virtue* merupakan kemauan dari warga negara untuk menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi (Arif, 2017: 5). Menurut Hidayati dan Harmanto (2017: 108), *civic virtue* ini memiliki dua unsur yaitu karakter kewarganegaraan dan komitmen kewarganegaraan. Karakter kewarganegaraan terdiri dari kepedulian terhadap masyarakat, memiliki tanggung jawab terhadap permasalahan masyarakat, dan toleransi terhadap keberagaman, sedangkan komitmen kewarganegaraan terdiri dari penyeimbangan hak-hak minoritas dan partisipasi politik.

*Civic virtue* (kebajikan/keadaban kewarganegaraan) perlu untuk dikembangkan dan dibangun demi kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat khususnya generasi muda perlu memiliki kesadaran terhadap diri sendiri untuk lebih dapat mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Hal tersebut perlu untuk dilakukan untuk mencapai tujuan bersama.

Konsep *civic virtue* dijelaskan juga oleh Quigley dalam Wianto (2010: 11) adalah *"...the willingness of citizen to set aside private interests and personal concerns for the sake of the common good",* yang dapat dimaknai sebagai kemauan dari warga negara untuk bisa menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Berdasarkan penjelasan Quigley dalam Susanti (2011: 4), *civic virtue* memiliki dua unsur yakni :

1) *Civic Disposition,* yakni karakter atau sikap warga negara yang mendorong berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi. *Civic disposition* meliputi karakteristik kepribadian seperti tanggung jawab individu, disiplin diri, kepedulian terhadap masyarakat, keterbukaan pikiran, toleransi terhadap adanya keragaman, kesabaran dan keajekan, kemurahan hati, dan kesetiaan terhadap bangsa dan segala prinsipnya untuk pemeliharaan dan perbaikan pemerintahan serta kewarganegaraan yang demokratis.
2) *Civic Commitment,* yakni komitmen warga negara yang menerima dengan sadar terhadap nilai dan prinsip demokrasi konstitusional. Kesediaan warga negara untuk bisa menghormati hak-hak minoritas, kontrol dan penyeimbangan, persamaan kebaikan umum (dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi), prinsip negara hukum, hak kebebasan, keadilan, dan cinta tanah air.

*Civic virtue* merupakan segala tindakan individu atau warga negara yang diwujudkan atau tercermin dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan perwujudan dari karakter dan komitmen yang dimilikinya supaya terciptanya kehidupan yang demokratis dan bertanggung jawab. Kebajikan kewarganegaraan ini perlu untuk dikembangkan dan dibentuk dalam diri setiap generasi muda sebagai elemen penerus bangsa. Generasi muda harus mampu mengimplementasikan pengetahuan yang telah didapat melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di bangku pendidikan formal secara

langsung dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan di lingkungan sekitarnya.

Pendapat L. Bray dan Larry W. Chappel (2005) dalam Susanti (2011: 16), *"Civic virtues are the qualities of character and personal skills necessary to make the exercise of citizenship meaningful. Civic virtues give us the capacity to exercise our rights, promote our interest and meet our duties".* Artinya kebajikan-kebajikan kewarganegaraan adalah kualitas dari karakter dan keterampilan-keterampilan pribadi yang diperlukan untuk kebermaknaan latihan kewarganegaraan. Kebajikan-kebajikan kewarganegaraan memberikan kepada kita kapasitas untuk berlatih hak-hak kita, mempromosikan minat kita, dan kewajiban-kewajiban kita.

Machiavelli menganggap bahwa warga negara yang baik adalah dimana warga negara terlibat secara aktif dari sudut pandang atau pandangan politik dan memahami bahwa satu-satunya cara untuk memiliki negara yang otentik adalah dengan menempatkan kebaikan bersama di atas kepentingan pribadi (Matei, 2011: 112). *Civic virtue* (kebajikan kewarganegaraan) merupakan sebuah komitmen dari warga negara untuk bisa mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi demi terwujudnya tujuan bersama serta kehidupan bernegara yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana seorang individu memiliki kesanggupan untuk hidup dalam keragaman misalnya keragaman pendapat serta perbedaan pandangan dan sikap, kematangan untuk menguasai dan mengendalikan egoisme, kesempatan untuk mengungkapkan diri dan menyatakan pendapat, serta kesediaan melakukan musyawarah dengan cara-cara yang rasional.

**b. Elemen *Civic Virtue***

Udin S. Winataputra dalam Winarno (2019), mengatakan bahwa pengembangan kebajikan kewarganegaraan *(civic virtue)* perlu

ditopang dengan pengembangan elemen-elemennya, yakni: wawasan/pengetahuan kewarganegaraan *(civic knowledge)*, sikap kewarganegaraan *(civic disposition)*, keterampilan kewarganegaraan *(civic skills)*, komitmen kewarganegaraan *(civic commitment)*, kepercayaan diri kewarganegaraan *(civic confidence)*, dan kecakapan kewarganegaraan *(civic competence)*. Secara keseluruhan kebajikan/ keadaban kewarganegaraan sangat diperlukan oleh setiap warga negara agar mau dan mampu mewujudkan partisipasi kewarganegaraan secara cerdas dan bertanggung jawab *(intelligent and responsible civic participation)*.

1) Pengetahuan kewarganegaraan *(civic knowledge)*
   Branson (Komalasari, 2011: 50), mengemukakan bahwa pengetahuan/wawasan kewarganegaraan berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui dan dipahami oleh warga negara. Selain itu, pengetahuan kewarganegaraan berkenaan dengan pengetahuan dan pemahaman akan kedudukan dirinya sebagai warga negara, yang memiliki hak dan kewajiban berdasar atas nilai-nilai konstitusi negara.
2) Sikap kewarganegaraan *(civic disposition)*
   Muchtarom (2012: 120), mengemukakan bahwa sikap atau watak kewarganegaraan sesungguhnya merupakan dimensi yang paling substantif dan esensial. Dimensi watak/sikap kewarganegaraan dapat dipandang sebagai muara dari pengembangan fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik watak kewarganegaraan yakni mencakup penghormatan dan interaksi manusiawi, tanggung jawab individual, disiplin diri, kepedulian terhadap masyarakat, keterbukaan pikiran, dan toleransi terhadap keragaman.
3) Keterampilan kewarganegaraan *(civic skills)*
   Menurut Muchtarom (2012: 120), keterampilan kewarganegaraan meliputi keterampilan intelektual dan keterampilan berpartisipasi

dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterampilan intelektual meliputi kemampuan seorang warga negara dalam mengidentifikasi, menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, dan menilai sesuatu hal. Keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi berperan serta aktif mewujudkan masyarakat madani *(civil society)*, keterampilan memecahkan masalah sosial, keterampilan mengadakan koalisi, kerja sama, dan mengelola konflik.

4) Komitmen kewarganegaraan *(civic commitment)*
   Susanti (2011: 17), komitmen kewarganegaraan adalah komitmen warga negara yang bernalar dan diterima dengan sadar terhadap nilai dan prinsip demokrasi konstitusional. Komitmen kewarganegaraan ini memandang kesediaan warga negara untuk mengikatkan dirinya dengan sadar pada peran dan kedudukannya dengan dilandasi oleh nilai-nilai kewarganegaraan maka akan membentuk seorang warga negara yang memiliki komitmen kuat.
5) Kepercayaan diri kewarganegaraan *(civic confidence)*
   Seorang warga negara yang memiliki pengetahuan dan sikap kewarganegaraan akan menjadi warga negara yang memiliki kepercayaan diri.
6) Kecakapan kewarganegaraan *(civic competence)*
   Kecakapan kewarganegaraan bisa terbentuk ketika seorang warga negara memiliki pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan dalam dirinya.

Pendapat yang dikemukakan oleh Rusnaini (Triyani, 2020: 32), setiap negara yang ingin maju ataupun tetap eksis dalam peraturan dunia global tentu menginginkan partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dari warga negara dalam kehidupan politik dan sosio kemasyarakatan baik pada tingkat lokal, nasional, maupun intenasional (global), partisipasi tersebut dapat dicapai jika warga

negara memiliki nilai-nilai kebajikan kewarganegaraan *(civic virtue)* yang baik.

**c. Perkembangan *Civic Virtue* Pemuda**

Pendapat dari Quigley bahwa *civic virtue* memuat dua unsur yaitu karakter kewarganegaraan *(civic disposition)* dan komitmen kewarganegaraan *(civic commitment).* Karakter kewarganegaraan dalam penelitian ini ditekankan kepada kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban para pemuda sebagai warga negara, dan kepedulian dalam memberikan kemudahan akses informasi bagi para pemuda. Komitmen kewarganegaraan ditekankan kepada memperkuat wawasan kebangsaan, membangkitkan sikap kritis terhadap kesadaran hukum.

1) Kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban bagi pemuda sebagai warga negara

   Menurut Mcdonough dkk., (2013), tanggung jawab merupakan hal yang berkenaan dengan tindakan atau tingkah laku dan inisiatif untuk menghormati hak orang lain guna membentuk karakter kewarganegaraan yang bertanggung jawab dan menghindari kekerasan serta perilaku yang merusak. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, sikap tanggung jawab harus dimiliki oleh semua warga negara, terutama generasi muda untuk dapat menekan apatisme terhadap lingkungan sekitar dan memupuk rasa tanggung jawab sosial generasi muda.

   Tanggung jawab pemuda merupakan hal yang menjadi landasan atau dasar bagi mereka ketika terjun dalam lingkungan sosial masyarakat. Melalui pendidikan kewarganegaraan, pemuda diajarkan untuk tidak hanya menjadi warga negara yang aktif, akan tetapi juga mereka harus dapat bertanggung jawab kepada keluarga dan masyarakat, menghormati hak orang lain, dan

mampu berinteraksi dengan masyarakat (Neufeld dan Davis, 2010).

Aristoteles mengatakan bahwa warga negara yang bertanggung jawab yakni warga negara yang baik, sedangkan warga negara yang baik adalah warga negara yang memiliki keutamaan *(exellence)* atau kebajikan *(virtue)* selaku warga negara (Rohani, 2015: 226). Warga negara yang bertanggung jawab *(civic responsibility)* yaitu warga negara yang berupaya seoptimal mungkin untuk melaksanakan dan menggunakan hak serta kewajibannya sesuai dengan cara menurut aturan-aturan yang berlaku.

2) Kepedulian dalam memberikan kemudahan akses informasi
Pemuda diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menggerakkan dan membawa inovasi di desa. Mengingat saat ini merupakan era Revolusi Industri 4.0, kemudahan untuk berkreativitas dan mengakses informasi terbuka lebar, tidak hanya bagi warga perkotaan namun juga di tingkat desa.

Kepekaan dengan perubahan yang terjadi dan memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini harus dimiliki oleh generasi muda misalnya melalui karang taruna diharapkan menjadi mitra yang mampu menghubungkan pemerintah dengan masyarakat mengingat karang taruna merupakan organsisasi yang sangat dekat dengan masyarakat. Pemuda harus dapat memudahkan dalam menjembatani komunikasi dan sosialisasi program pemerintah.

3) Memperkuat wawasan kebangsaan
Memperkuat wawasan kebangsaan dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan sosialisasi dalam rangkat meningkatkan rasa nasionalisme, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta menumbuhkan nilai-nilai patriotisme pada generasi muda.

Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang didasari oleh falsafah cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia.

Berdasarkan penelitian ini maka erat kaitannya dengan para generasi muda dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Implementasi pemahaman tersebut dapat berdampak pada memupuk rasa mental dan keberanian pada generasi muda dalam menciptakan ketenteraman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

4) Sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum
Pemuda yang memiliki potensi sebagai agen perubahan *(agent of change)* terlihat dalam integritas dan idealisme mereka dalam menyikapi permasalahan-permasalahan sosial. Generasi muda memiliki pemikiran dan tindakan kritis yang dapat membawa perubahan bagi bangsa menuju ke arah yang lebih positif. Sikap kritis ini merupakan kemampuan menganalisis, menggunakan akal sehat sesuai nalar dalam menghadapi permasalahan dan menyelesaikannya.

**d. Hubungan *Civic Virtue* dengan *Civic Participatory* dan *Responsibility***

Pelaksanaan pembinaan pemuda guna membentuk kebajikan kewarganegaraan *(civic virtue)* secara formal dapat dilakukan melalui institusi pendidikan, salah satu upayanya yakni melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan menekankan pada bagaimana membentuk warga negara yang baik *(how to be good citizenship).* Berdasarkan pembagian domain pendidikan kewarganegaraan, peran dari aparatur desa termasuk dalam

domain politik dan kenegaraan yang menekankan pada konsep dan praksis pendidikan kewarganegaraan di lingkungan masyarakat (Wahab dan Sapriya, 2011).

Pengembangan dimensi kedaban kewarganegaraan *(civic virtue)* merupakan landasan dalam pengembangan dimensi kewarganegaraan yang lain yakni *civic participation* dan *civic responsibility* yang memang merupakan tujuan akhir dari *civic education.* Peran serta para aparatur desa dalam mengupayakan agar masyarakatnya memiliki kapasitas diri terutama pemuda sebagai sumber daya manusia yang produktif untuk dapat berpartisipasi sebagai warga negara dan bagian dari masyarakat untuk meningkatkan kepedulian serta tanggung jawab sosial mereka.

Tanggung jawab kewarganegaraan *(civic responsibility)* memiliki kriteria yaitu kontrol diri dan dapat menghormati hak orang lain, usaha dan partisipasi, pengarahan diri, dan membantu sesama (Martinek dkk., 2001). Pemuda dapat berusaha untuk menjalin kerja sama dan hubungan antara sesama pemuda maupun sesama masyarakat di lingkungannya untuk mau bergerak dan melakukan suatu perubahan yang dapat memunculkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap sesama.

Pemberdayaan pemuda juga bertujuan untuk mengembangkan partisipasi warga negara *(civic participatory)* yang menjadi salah satu komponen penting dalam mewujudkan kehidupan yang demokratis. Partisipasi warga negara merupakan setiap aktivitas individu atau kelompok yang bekerja sama untuk mengatasi suatu masalah publik. Berdasarkan kriteria dari *Center for Civic Education* (CCE) (dalam Susanto, 2014) mengenai *civic participatory* meliputi:

1) Berinteraksi (termasuk berkomunikasi) terhadap objek yang berkaitan dengan masalah-masalah publik, misalnya dengan bertanya, menjawab, dan berdiskusi dengan sopan.

2) Memantau/memonitor masalah politik dan pemerintahan terutama dalam penanganan persoalan-persoalan publik, antara lain dengan menggunakan berbagai sumber informasi untuk mengetahui persoalan-persoalan publik, menghadiri berbagai pertemuan publik seperti pertemuan organisasi kemasyarakatan.
3) Memengaruhi proses politik, pemerintah baik secara formal maupun informal antara lain dengan melakukan simulasi tentang kegiatan (kampanye, pemilu), memberikan suara dalam suatu pemilihan, dan meminta atau menyediakan diri untuk menduduki jabatan tertentu.

Pentingnya partisipasi dari warga negara dalam pencapaian tujuan bersama menunjukkan bahwa ada dukungan dan keikutsertaan dari setiap anggota masyarakat. Partisipasi warga negara *(civic participatory)* dapat dimaknai sebagai keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan atau aktivitas baik secara fisik maupun mental dan emosional dimana mereka dilibatkan dalam perencanaan serta pelaksanaan guna mencapai suatu tujuan. Sifat warga negara yang mampu aktif dalam memelihara keadilan dan stabilitas politik sebagai kewajiban sosial individu untuk mengembangkan dan memelihara solidaritas sosial global menjadi salah satu bentuk partisipasi dan tanggung jawabnya. Seorang individu dapat berperan serta *(civic participation)* ini diperlukan pengetahuan tentang konsep fundamental, sejarah, isu, dan fakta yang berkaitan dengan substansi dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut.

Terdapat keterkaitan mengenai keadaban kewarganegaraan *(civic virtue)* dengan partisipasi dan tanggung jawab warga negara dimana *civic virtue* menjadi bekal warga negara untuk secara sadar melakukan partisipasi sebagai wujud dari tanggung jawab kewarganegaraan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Aristoteles (Rohani, 2015: 226) bahwa warga negara yang bertanggung jawab yakni warga negara yang baik, sedangkan warga negara yang baik adalah warga negara

yang memiliki keutamaan/ kebajikan *(virtue)* selaku warga negara. Partisipasi dan tanggung jawab yang bermutu dalam kehidupan bermasyarakat merupakan suatu keharusan karena kemampuan untuk berpartisipasi dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang demokratis, berpikir secara kritis, dan bertindak secara sadar dalam bangsa yang plural.

**6. Teori Perkembangan Moral Menurut Piaget**

Piaget mengemukakan mengenai perkembangan kognitif yang di dalamnya juga mencakup tentang perkembangan penalaran moral. Piaget percaya bahwa kemampuan kognisi individu berkembang lebih dulu, kemudian kemampuan tersebut akan menentukan kemampuan individu bernalar tentang situasi sosialnya. Buku karangan Piaget yang berjudul *The Moral Judgement of the Child,* Piaget menyatakan bahwa kesadaran moral seorang anak akan mengalami perkembangan dari satu tahap menuju tahap yang lebih tinggi (Wijayanti, 2015: 87). Perkembangan moral berkaitan dengan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh individu dalam berinteraksi dengan orang lain.

Menurut Piaget, individu berpikir dalam dua cara berbeda mengenai moralitas, tergantung pada kematangan perkembangan mereka yaitu moralitas heteronom *(heteronomous morality)* dan moralitas otonom *(otonoum morality)* (Santrock, 2003: 439). Secara lebih terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Moralitas Heteronom

Tahap pertama perkembangan moral ini menurut Piaget terjadi pada rentan usia 4-7 tahun. Pada tahapan ini moralitas yang terbentuk belum matang secara intelektual, maka tindakan anak bukan atas dasar motivasi yang ada pada dirinya. Cara berpikir pada perkembangan moralitas heteronom didasarkan pada penilaian kebenaran atau kebaikan perilaku dengan mempertimbangkan akibat dari perilaku tersebut, bukan maksud dari perilaku. Individu masih belum atau

kurang memiliki kemampuan untuk membedakan aspek-aspek yang berasal dari dirinya sendiri dan aspek-aspek yang berasal dari situasi sosial, sehingga individu atau anak cenderung tidak dapat menerima pendapat orang lain dalam situasi sosial.

b. Moralitas Otonom

Tahapan kedua pada perkembangan moral yakni *autonom morality,* di mana pada tahapan ini terjadi pada rentan usia 10 tahun ke atas. Seorang individu akan memiliki kesadaran bahwa aturan-aturan dan ketentuan diciptakan oleh manusia dan dalam menilai suatu tindakan, seseorang harus mampu mempertimbangkan maksud pelaku dan juga akibat-akibatnya. Mereka mulai memiliki kemampuan untuk memainkan peran sesuai dengan perkembangan intelektualnya, dan berdasarkan perkembangan kognitif pula maka anak mampu mempertimbangkan semua cara yang mungkin untuk memecahkan masalah tertentu dan dapat bernalar atas dasar hipotesis. Hal tersebut memungkinkan anak untuk melihat suatu persoalan dalam berbagai sudut dan mempertimbangkan berbagai faktor untuk pemecahannya.

## B. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Fauzi dan Prima Roza dengan judul "Implementasi Nilai Kebajikan Warga Negara *(Civic Virtues)* di Institut Teknologi Bandung". Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui hasil belajar mata kuliah PPKn dan untuk menganalisis pelaksanaan mata kuliah PPKn dalam penanaman nilai-nilai kebajikan berdasarkan Pancasila. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu survei di kelas. Capaian pembelajaran *(learning outcomes)* mata kuliah PPKn di ITB disusun dan terdiri dari unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan yang disusun berdasarkan kriteria sistem ABET *(Accreditation Board for Engineering and Technology).*

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran mata kuliah PPKn di ITB telah memberikan pengaruh yang signifikan untuk penanaman nilai-nilai kebajikan kepada mahasiswa berdasarkan Pancasila, dan meningkatkan pengetahuan dan kompetensi mahasiswa sebagai warga negara dewasa untuk mampu menjadi pilar pembentukan negara demokratis. Pembelajaran ini juga memberikan pemahaman dan keterampilan yang dibutuhkan warga negara untuk siap berpartisipasi dalam mewujudkan kebajikan warga negara. Penelitian ini dirasa relevan dengan penelitian peneliti karena membahas salah satu variabel yang sama yaitu mengenai kebajikan kewarganegaraan *(civic virtue).* Namun perbedaan terletak pada pendekatan penelitian yang digunakan dan ruang lingkup penelitian. Penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan ruang lingkup lingkungan masyarakat dan subjek penelitiannya yaitu pemuda karang taruna.

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dikdik Baehaqi Arif, Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang berjudul "Pengembangan Kebajikan Kewargaan *(Civic Virtue)* dalam Masyarakat Multikultural Indonesia: Peran Pendidikan Kewarganegaraan". Penelitian tersebut bertujuan untuk menjelaskan peran pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kebajikan kewargaan sebagai komponen penting budaya kewargaan dalam masyarakat multikultural Indonesia.

   Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berorientasi untuk mempersiapkan warga negara muda agar memiliki kemampuan untuk terlibat dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat politik. Kebutuhan untuk membina generasi yang akan datang dengan kemampuan menyusun kerangka moral imajinatif kian penting bukan saja untuk menyelesaikan persoalan dengan cara yang rasional, tetapi juga penting untuk menjaga keutuhan masyarakat Indonesia yang multikultural. Melalui proses pembelajaran siswa di kelas dengan dihadapkan pada persoalan yang kompleks ruang kelas pendidikan kewarganegaraan yang

luas dirasa tepat, karena penanaman nilai-nilai kebajikan kewargaan tidak bisa dilepaskan dari pembentukan iklim sosial. Muatan dalam pendidikan kewarganegaraan di sekolah menurut Abdullah sangat erat kaitannya dengan penanaman kesadaran kepada masyarakat akan keragaman *(plurality),* kesetaraan *(equality),* kemanusiaan *(humanity),* keadilan *(justice),* dan nilai-nilai demokrasi *(democration values).* Maka output dari proses pendidikan kewarganegaraan dalam mewujudkan kehidupan demokratis berkeadaban akan tercapai.

Penelitian ini relevan dengan penelitian peneliti karena membahas pembentukan *civic virtue.* Selain itu, fokus penelitian ini adalah peranan dari mata pelajaran PPKn dimana memiliki keterkaitan dengan penelitian peneliti. Pengetahuan yang telah didapat melalui pendidikan formal, maka diharapkan bisa diterapkan di lingkungan masyarakat. Tujuan pembelajaran PPKn yaitu untuk membentuk warga negara yang dapat berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab *(civic participatory and responsibility).* Maka warga negara bisa berpartisipasi melalui organisasi kepemudaan karang taruna yang ada di desa.

3. Penelitian dengan judul "Partisipasi Masyarakat dalam Membangun *Civic Virtue* di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan" yang dilakukan oleh Nur Hidayati dan Harmanto dari Program Studi PPKn Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Semarang. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mendeskripsikan tentang *civic virtue* yang berkembang di Desa Balun dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan *civic virtue* di Desa Balun Kecamatan Turi. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

   Teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori Neo Republikan oleh Gunsteren. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa *civic virtue* yang berkembang di Desa Balun antara

lain kepedulian terhadap masyarakat yang tinggi karena faktor kekeluargaan yang dimiliki oleh masyarakat, toleransi terhadap keberagaman sangat dijunjung tinggi, warga yang beragama minoritas memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan dan partisipasi politik masyarakat sangat tinggi dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat desa Balun ketika melaksanakan pemilu. *Civic virtue* di Desa Balun berkembang dengan baik karena keterlibatan masyarakat yang terjun langsung dalam berbagai macam kegiatan seperti keagamaan. Pengembangan *civic virtue* di Desa Balun dilakukan melalui pendidikan keluarga (orang tua) dengan menasehati dan memberi pengarahan dan pembinaan kepada anaknya untuk selalu menjunjung tinggi dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Masyarakat juga memiliki kesadaran untuk lebih mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan individu.

4. Berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti merasa penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herlina Dewi Susanti Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret dengan judul "Pembelajaran Demokrasi dalam Pembentukan *Civic Virtue* pada Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 10 Surakarta Tahun Ajaran 2009/2010". Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni wawancara dan studi literatur. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi, dan penarikan kesimpulan.

   Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan bahwa pembelajaran demokrasi dalam pembentukan *civic virtue* pada siswa di SMP Negeri 10 Surakarta sepenuhnya belum tercapai. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Guru kurang memahami arti KTSP, karena masih berpatokan pada materi ajar bukan pada standar kompetensi sehingga guru berargumen bahwa terlalu banyaknya materi yang harus disampaikan pada siswa dengan perbandingan waktu

penyajian yang kurang, (2) Kurangnya implementasi di kehidupan sehari-hari, (3) Siswa hanya mengejar hasil uji kompetensi saja, (4) Antusias siswa kurang dalam mempelajari PPKn karena mata pelajaran ini tidak termasuk mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional. Berdasarkan hasil tersebut, tidak terdapat kesesuaian atau keseimbangan pencapaian mata pelajaran PPKn dimana seharusnya kompetensi-kompetensi dalam PPKn dapat tercapai sehingga dapat membentuk *civic virtue* dalam diri siswa. Namun fokus penelitian ini adalah pembentukan *civic virtue* siswa di lingkungan sekolah.

5. Penelitian dengan judul "Peranan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Tahun 2016" yang dilakukan oleh Intan Bimbing Rakasiwi Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada tahun 2017. Tujuan dalam penelitian tersebut adalah untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana peranan aparatur desa dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kuantitatif, subjek penelitiannya adalah aparatyr desa Sidodadi yang berjumlah 22 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni menggunakan angket dengan analisis data menggunakan analisis deskriptif.

   Hasil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu menunjukkan bahwa aparatur desa kurang berperan dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar yang menyebabkan pelaksanaan Program Indonesia Pintar di Desa Sidodadi Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran masuk dalam kategori tidak baik. Hal tersebut berarti pemuda yang kurang memiliki sikap tanggap, dan peduli pada lingkungan sekitar sehingga mereka tidak menjalankan peran dan tugasnya sebagai pemuda dan anggota karang taruna. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada variabel yang diteliti, yakni peran dari organisasi kepemudaan karang taruna sehingga relevan antara kedua penelitian ini. Sedangkan

perbedaannya yakni terletak pada variabel terikat pada penelitian penulis yakni kebajikan kewarganegaraan pemuda, serta pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan kualitatif.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Neng Yeyet dari Universitas Galuh dengan judul "Peran Pemerintah Desa dalam Pembinaan Karang Taruna di Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Caimis". Berdasarkan penelitian tersebut, metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara, studi literatur, dan observasi (pengamatan). Tujuan dari penelitian tersebut yakni untuk menjelaskan secara lengkap dan mendalam mengenai peran dari pemerintah desa dalam pembinaan karang taruna, hambatan yang dialami dalam melakukan pembinaan, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut. Teknis analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

   Hasil penelitian berdasarkan yang telah dilakukan didapatkan bahwa Pemerintah Desa Nasol Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis telah melakukan pembinaan meski belum optimal. Hal tersebut terjadi dikarenakan masih terdapat beberapa indikator yang dalam proses pelaksanaannya belum berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam hal pembinaan karang taruna seperti sulitnya untuk bertukar pikiran karena sering terjadi perdebatan antara keduanya dikarenakan perbedaan keinginan. Bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah desa juga belum maksimal. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dalam menghadapi hambatan yang dialami yakni dengan cara memberikan arahan, serta memberikan penjelasan mengenai tujuan yang hendak dicapai atau bimbingan kepada para pemuda untuk merumuskan suatu visi misi dan juga memberikan kesempatan secara mandiri untuk mampu mengelola keuangan karang taruna seperti dengan mengajukan berbagai permohonan bantuan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan.

7. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dirasa relevan oleh peneliti yaitu penelitian yang dilakukan oleh Risa Safira Lutfiani dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul ”Pembinaan Kebajikan Kewarganegaraan *(Civic Virtue)* Melalui Program Pendidikan Karakter Bandung Masagi: Studi Kasus di SMP Negeri 25 Bandung”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni wawancara, observasi, studi dokumentasi, studi literatur, dan catatan lapangan.

   Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu : 1) Perencanaan program pendidikan karakter Bandung Masagi sudah terencana dengan baik; 2) Pembinaan kebajikan kewarganegaraan *(civic virtue)* di SMP Negeri 25 Bandung melalui pelaksanaan program pendidikan karakter Bandung Masagi relatif baik; 3) Program pendidikan karakter Bandung Masagi berkontribusi dalam membina kebajikan kewarganegaraan *(civic virtue)* di SMP Negeri 25 Bandung; 4) Kurangnya kerja sama menjadi faktor utama kendala dalam pelaksanaan program pendidikan karakter Bandung Masagi di SMP Negeri 25 Bandung; 5) Perbaikan pola kerja sama sebagai upaya mengatasi kendala tersebut dalam program pendidikan karakter Bandung Masagi di SMP Negeri 25 Bandung. Jadi secara umum pengembangan kebajikan kewarganegaraan melalui pendidikan karakter Bandung Masagi sudah baik tercermin dari tingkat partisipasi peserta didik, dan keikutsertaan peseta didik dalam melaksanakan program pendidikan di beberapa kegiatan diantaranya membaca Al-Qur’an dan asmaul husna, melaksanakan sholat dhuha bersama, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan melaksanakan kegiatan kepramukaan.

8. Penelitian yang berjudul *”The Effort to Foster Civic Virtue in Elementary Schools”* yang dilakukan oleh May Nisa Istiqomah, Mirza Hardian, Yayuk Hidayah, dan Nufikha Ulfah dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi usaha pembinaan *civic virtue* di Sekolah Dasar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif

kualitatif, dengan pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu model Miles dan Huberman. Subjek dalam penelitian ini yakni siswa siswi kelas 1 SD Negeri 4 Darmakradenan, Ajibarang, Banyumas, Indonesia Tahun ajaran 2019/2020.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pembinaan *civic virtue* di Sekolah Dasar di SD Negeri 4 Darmakradenan diformulasikan dengan menanamkan konsep-konsep *civic virtue* dalam skala pengenalan konsep tentang kebangsaan sehingga dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air. Selain itu, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Sekolah Dasar menjadi jembatan dalam upaya pembinaan *civic virtue* di SD Negeri 4 Darmakradenan. Namun terdapat hambatan dalam pengembangan kebajikan kewarganegaraan di SD Negeri 4 Darmakradenan yaitu kurangnya kerja sama antara sekolah dan orang tua. Sehingga upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan pemberian teladan (guru dan orang tua) agar mampu menunjukkan contoh sikap dan perilaku yang baik saat menyelesaikan masalah yang dialami anak.

9. Penelitian yang dilakukan oleh James B. Hoesterey dengan judul *"Prophetic Cosmopolitanism: Islam, Pop Psychology, and Civic Virtue in Indonesia"* dari Universitas Michigan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan kebajikan kewarganegaraan ditinjau dari Kosmopolitanisme Profetik antara Islam dan Psikologi Populer di Indonesia. Berdasarkan penelitian ini didapatkan bahwa sebagai seorang relawan sipil (Gema Nusa), setiap individu harus mampu menjadi teladan moral yang baik, harus mampu mengatasi perbedaan agama di negara Indonesia yang plural, dan memberikan pelayanan yang setia pada masyarakat. Menurut Gymnastiar dalam (Hoesterey, 2012: 50), pengetahuan diri dan disiplin etika adalah kunci kebajikan sipil di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang akan dilakukan

oleh peneliti dimana pemuda harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai tanggung jawab yang diembannya.

10. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dirasa relevan dengan penelitian peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Ekow N. Yankah dengan judul *"Legal Vices and Civic Virtue: Vice Crimes, Republicanism and the Corruption of Lawfulness"* dari Cardoza Law School Amerika Serikat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara hukum dengan kebajikan berdasarkan teori kebajikan yang dikemukakan oleh Aristoteles. Berdasarkan penelitian ini, kebajikan kewarganegaraan yang paling dasar dan menjadi fondasi dari semua kebajikan adalah ketaatan pada hukum. Namun ketika hukum tidak mampu memberikan pedoman dan tidak berprinsip, maka ini menjadi salah satu alasan untuk tidak mematuhi hukum. Kepatuhan hukum menggambarkan kebajikan kewarganegaraan, dimana terdapat kesediaan warga negara untuk secara umum mengikuti hukum yang adil dan mengesampingkan kepentingan pribadi seseorang untuk mematuhi persyaratan hukum. Aristoteles mengatakan bahwa kebajikan kewarganegaraan didasarkan pada pencarian kebaikan bersama dan berbagi dalam pengorbanan bersama. Akan tetapi ternyata saat ini telah terjadi erosi kebajikan kewarganegaraan dikarenakan hukum hanya menjadi instrumen kekuasaan dan pemerintahan semata. Maka dari itu, diperlukan perbaikan bahwa pedoman normatif hukum itu penting dalam membimbing perkembangan karakter warga negara. Penelitian ini relevan dengan penelitian peneliti karena salah satu indikator dari kebajikan kewarganegaraan adalah ketaatan dan penegakan hukum oleh warga negara.

## C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan arahan penalaran untuk dapat sampai pada pemberian jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Keadaban kewarganegaraan *(civic virtue)* dapat terbentuk melalui pembudayaan pembinaan watak dan karakter warga negara. Winataputra menjelaskan bahwa *civic virtue* merupakan domain psikososial individu dimana di dalamnya mencakup ketertiban aktif warga negara, kerja sama, toleransi dan saling percaya, kehidupan yang kooperatif, solidaritas dan semangat kemasyarakatan (Hemafitria, 2019: 3). Seorang warga negara terutama pemuda yang menjadi subjek dalam penelitian ini diharapkan secara sadar memiliki kepedulian terhadap negaranya, mampu berpikir kritis terhadap setiap permasalahan sosial yang terjadi di sekitarnya, serta mampu untuk mengesampingkan ego diri demi kepentingan bersama.

Mengarah pada pendapat dari Quigley, *civic virtue* memiliki dua unsur penyokong yakni watak kewarganegaraan *(civic disposition)* dan komitmen kewarganegaraan *(civic commitment)*. Watak kewarganegaraan adalah sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial demi kepentingan umum dalam sistem demokrasi. Watak kewarganegaraan mencakup karakteristik kepribadian seperti tanggung jawab individu, disiplin diri, kepedulian terhadap masyarakat, keterbukaan pikiran, toleransi terhadap adanya keragaman, kesabaran dan keajekan, kemurahan hati, dan kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Sedangkan komitmen kewarganegaraan yakni usaha secara sadar dari warga negara yang bernalar dan diterima terhadap nilai dan prinsip demokrasi konstitusional. Di dalamnya meliputi kesediaan warga negara untuk bisa menghormati hak-hak minoritas, persamaan kebaikan umum (dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi), prinsip negara hukum, hak kebebasan, keadilan, dan cinta tanah air.

Pemuda saat ini kurang memanfaatkan waktu dan potensi yang ada dalam dirinya. Mereka cenderung menjadi anti sosial karena terlena dengan perkembangan teknologi sekarang ini. Kecenderungan untuk mementingkan

diri sendiri serta bersikap apatis dirasa lebih menguntungkan daripada harus bersusah payah memedulikan apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya bahkan Indonesia. Pergeseran perilaku yang membuat pemuda semakin individualisme menjadi salah satu kegagalan dalam pengembangan kebajikan kewarganegaraan. Sejatinya merekalah harapan bangsa yang seharusnya mampu memiliki kesadaran serta tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.

Keaktifan pemuda yang tergolong rendah terhadap pelibatannya dalam masyarakat di desa khususnya tidak terlepas dari pengetahuan dan sosialisasi yang kurang beredar serta kurangnya kerja sama dengan para pemerintah yang ada di desa. Adanya komunikasi dua arah yang terjalin melalui koordinasi yang baik antara pemerintah desa dengan para pemuda dapat saling berdiskusi demi membangun  semangat kerja sama dan mewujudkan kehidupan yang damai dan berkeadaban.

Perlunya pengembangan kualitas, keterampilan, kepribadian, dan kecakapan hidup tidak bisa dicapai hanya dengan mengikuti pendidikan formal, namun juga dapat dilakukan melalui wadah (lembaga atau organisasi) yang mempunyai komitmen terhadap pengembangan generasi muda tersebut. Pemerintah desa sebagai sarana perpanjangan yang memiliki keeratan dengan masyarakat desa serta mempunyai posisi yang cukup strategis untuk menggerakkan generasi muda untuk lebih memiliki tanggung jawab serta kepedulian terhadap permasalahan sosial di masyarakat. Pemberdayaan pemuda guna membangkitkan potensi, partisipasi serta peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pengembangan *civic virtue* merupakan landasan bagi pengembangan partisipasi warga negara yang memang merupakan tujuan akhir dari *civic education* (Pendidikan Kewarganegaraan). Pembentukan *civic virtue* pada pemuda berupa kebajikan minimal yaitu kesanggupan untuk hidup dalam keragaman pendapat serta perbedaan pandangan dan sikap, kematangan untuk menguasai dan mengendalikan egoisme, kesempatan untuk mengungkapkan diri dan menyatakan pendapat. Untuk itu dipandang penelitian perlu dilakukan

yang berjudul Peran Aparatur Pemerintah Desa dalam Pembinaan Pemuda di Desa Braja Asri sebagai Upaya Pembentukan *Civic Virtue.* Kerangka berpikir dapat peneliti sajikan dalam bentuk bagan sebagai berikut :

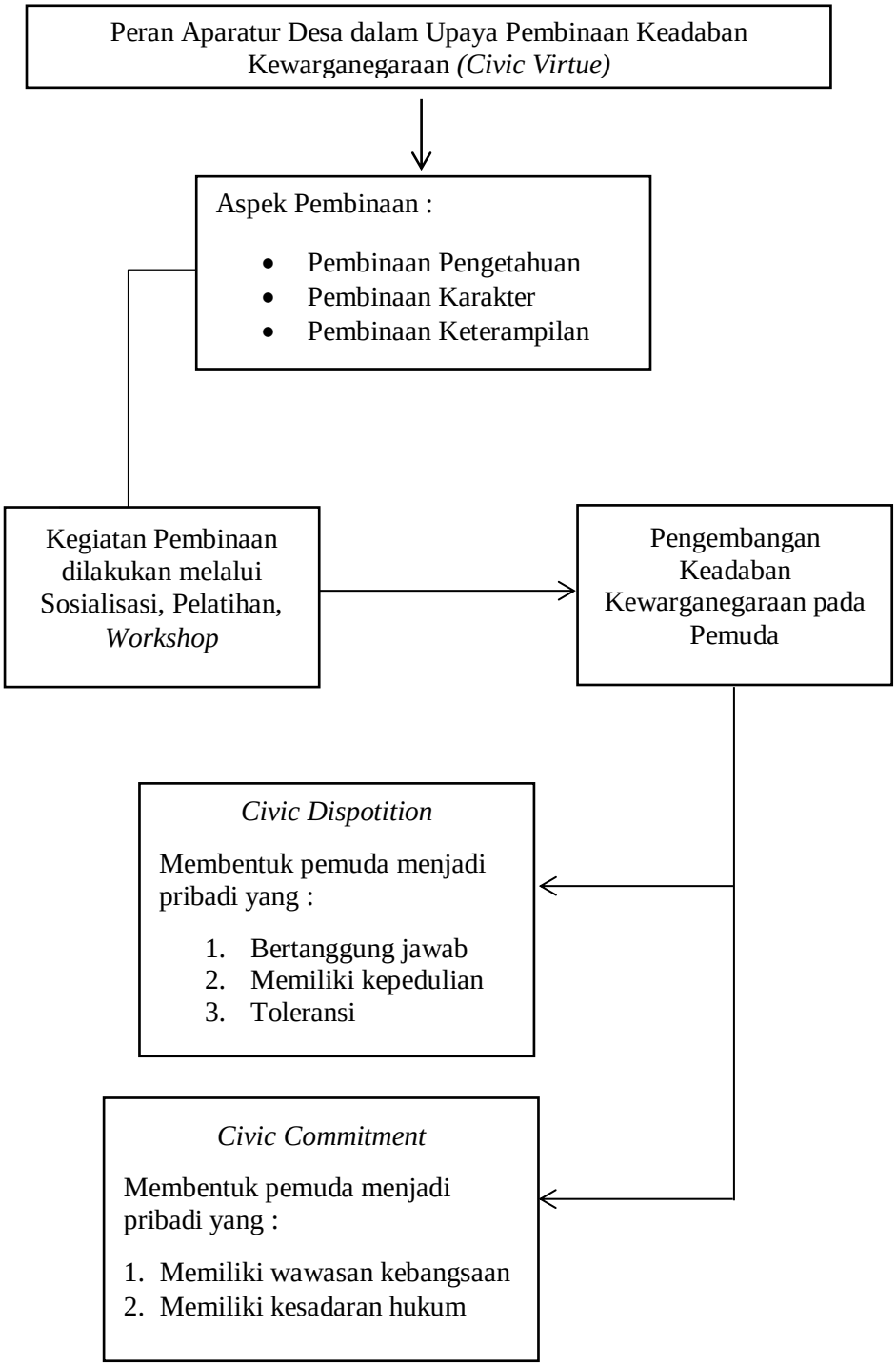


**Gambar 2 Kerangka Berpikir**

# III. METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai peran aparatur desa dalam membina serta memberdayakan pemuda sebagai upaya pembentukan keadaban kewarganegaraan *(civic virtue)* ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni sebuah konsep yang meliputi beberapa bentuk penyelidikan yang membantu dalam memahami dan menjelaskan makna fenomena sosial yang dialami secara alamiah. Pendekatan kualitatif digunakan untuk melihat lebih dalam dan mengamati sebuah kasus dari masalah sosial atau fenomena sosial yang digambarkan dengan kata-kata dan penjabaran untuk mengungkap makna dibalik realitas (Al-Muchtar, 2016). Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang lebih dalam membahas masalah-masalah sosial yang digambarkan melalui kata-kata dan penjabaran.

Pendekatan kualitatif bermaksud mengumpulkan data yang berdasarkan kata-kata (misalnya wawancara dengan narasumber), gambar (misalnya dari foto) dan pengamatan (misalnya dengan observasi), serta mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian dari sejumlah kecil individu dan tempat guna dianalisis dan menginterpretasikan makna yang lebih besar dari temuannya. Menurut Indrawan dan Yaniawati (2016), pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber dan data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan),

analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Metode memiliki peranan yang sangat penting karena metode merupakan cara ilmiah yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang valid yang berhubungan dengan penelitian. Penggunaan metode deskriptif didasarkan pada pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan masyarakat sesuai fakta dan kebenarannya di lapangan. Suharsimi Arikunto (Kadaria, 2019: 42) menyatakan bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksudkan menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan.

Penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti tidak menggunakan angka atau jumlah pengukuran melainkan menggunakan keterangan dan tanggapan atau respon yang berhubungan dengan objek yang nantinya akan dilakukan proses penganalisaan data dan diakhiri dengan proses penarikan kesimpulan. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian dan jenis data yang yang akan diperlukan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif karena dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan menganalisis peran dari pemerintahan desa dalam melakukan pembinaan pada pemuda di Desa Braja Asri Kecamatan Way Jepara untuk mendukung pembentukan keadaban kewarganegaraan *(civic virtue).*

## B. Subjek Penelitian atau Informan

Pemilihan informan harus memenuhi syarat kesesuaian *(appropriateness)*, artinya informan dipilih untuk menjelaskan kondisi atau fakta/fenomena yang dialami informan itu sendiri. Adapun informan yang diamati adalah manusia karena mereka pada dasarnya memiliki pengalaman keterlibatan, baik sebagai pelaku, korban atau yang menyaksikan langsung peristiwa atau masalah yang sedang diteliti, sehingga nantinya informan tersebut dapat membantu dalam

proses pemaknaan dan penafsiran atau berbagai fakta dan temuan di lapangan.

Penentuan subjek penelitian ini, peneliti menggunakan *Purposive Sampling* yaitu peneliti dapat menentukan atau memilih siapa informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam sehingga dapat menjadi sumber data dalam penelitian. Berikut informan yang dijadikan sumber informasi dalam penelitian ini:

1. Kepala Desa Braja Asri
2. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Braja Asri
3. Kepala Dusun
4. Sebagian pemuda Desa Braja Asri

## C. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

   Data primer adalah data yang diamati, diteliti, dan dicantumkan pertama kali dalam sumbernya. Data primer diperoleh langsung dari subjek yang menggunakan instrumen pengambilan data secara langsung kepada sumber yang bersangkutan. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data hasil wawancara dengan kepala Desa Braja Asri, kepala seksi pemerintahan, kepala dusun, dan sebagian pemuda di Desa Braja Asri.

2. Sumber Data Sekunder

   Sumber data sekunder merupakan data atau informasi dari objek peneliti yang bersifat publik dan diperoleh secara tidak langsung, terdiri dari struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder ini dikumpulkan bertujuan untuk menunjang dari data primer. Kedua data tersebut dipergunakan untuk saling melengkapi, karena data yang di lapangan  tidak akan sempurna apabila tidak ditunjang dengan data

lainnya dengan mempergunakan kedua sumber data tersebut maka data yang terhimpun dapat memberikan validitas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam hal ini sumber data sekunder dapat diperoleh dari dokumen seperti berkas-berkas desa, foto-foto yang dimiliki oleh pemerintah Desa Braja Asri.

## D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Braja Asri, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, penetapan lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* atau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mendukung tercapainya tujuan penelitian serta daerah tesebut juga terjangkau oleh peneliti sehingga akan membantu mempermudah dalam pelaksanaan penelitian dan pengumpulan data.

## E. Informan dan Unit Analisis

Penggunaan istilah informan dalam penelitian kualitatif dipilih untuk menjelaskan kondisi atau fakta/ fenomena yang terjadi atau dialami informan itu sendiri. Penentuan subjek penelitian ini, peneliti menggunakan *Purposive Sampling* yaitu peneliti dapat menentukan atau memilih siapa informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam sehingga dapat menjadi sumber data dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif juga mengenal adanya istilah unit analisis yang merupakan satuan analisis yang digunakan dalam penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah aparatur desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan kepala dusun.

Aparatur Desa Braja Asri merupakan informan kunci dalam penelitian ini dikarenakan peneliti akan meneliti bagaimana tugas dan upaya yang dilakukan oleh para aparatur dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan pada pemuda sebagai bagian dari sumber daya manusia yang memiliki potensi besar. Upaya pembinaan yang dilakukan ini bertujuan untuk mendukung pembentukan keadaban kewarganegaraan *(civic virtue)* dalam diri pemuda.

Sedangkan yang menjadi informan pendukung adalah sebagian pemuda Desa Braja Asri. Berikut ini tabel informan dan unit analisis yang akan diteliti:

**Tabel 3 Informan dan Unit Analisis**

| No. | Kriteria Informan | Unit Analisis | Keterangan | Kode |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Informan kunci | Peran | Kepala Desa<br>Kasi Pemerintahan<br>Kepala Dusun | Kades<br>KP<br>Kadus |
| 2. | Informan Pendukung | *Civic Virtue*<br>Pemuda Desa | Pemuda Desa | PD |

## F. Instrumen Penelitian

Penelitian ini sebagai subjek penelitiannya adalah peneliti yang berperan sebagai alat dan subjek penelitian. Peneliti bertindak sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Pengertian instrumen atau alat di sini tepat karena peneliti menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian. Sikap kritis dan terbuka sangat penting dalam penelitian kualitatif ini karena hasil penelitian sangat tergantung pada peneliti sebagai instrumen pengumpulan data utamanya.

## G. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti sangat penting disamping sebagai instrumen penelitian juga sebagai faktor penting dalam seluruh proses penelitian, karena kedalaman dan ketajaman dalam menganalisis data tergantung pada peneliti itu sendiri. Peneliti berperan untuk mengumpulkan dan mengolah data yang selanjutnya data-data tersebut akan dibuat laporan penelitian. Hal ini peneliti lakukan agar perolehan data dan informasi lebih valid atau validitas pengumpulan data dan informasi lebih akurat.

Tanpa kehadiran peneliti, maka peneliti tidak bisa meneliti masalah yang ada di lingkungan masyarakat tersebut dan data-data yang dibutuhkan tidak akan didapatkan. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan peneliti di Desa Braja Asri, penelitian dilakukan setelah memasukkan surat izin penelitian pendahuluan pada tanggal 4 Agustus 2020. Setelah itu, pada tanggal 18-20 Agustus 2020 peneliti melakukan wawancara dengan pengurus karang taruna Desa Braja Asri dari ketua, dan wakil ketua karang taruna. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan kepala desa Braja Asri, serta pemuda desa tersebut.

**Tabel 4 Kehadiran Peneliti**

| Informan | Tempat | Waktu | Dimensi Informasi |
|---|---|---|---|
| Lokasi Desa Braja Asri | Desa Braja Asri | 11 Agustus 2020 | Lingkungan Desa Braja Asri, |
| Pemuda Desa (PD) | Rumah Informan | 18 Agustus 2020 | Keaktifan pemuda dalam kegiatan masyarakat |
| Ketua Karang Taruna (KK) | Rumah Informan | 19 Agustus 2020 | Program kerja karang taruna |
| Kepala Desa (KD) | Rumah Informan | 20 Agustus 2020 | Kegiatan Pembangunan Desa |
| Sekretaris Desa (SD) | Kantor Desa | 2 September 2021 | Data kependudukan |
| Kepala Seksi Pemerintahan (KSP) | Kantor Desa | 12 April 2022 | Wawancara |
| Pemuda Desa (PD1) | Rumah Informan | 15 April 2022 | Wawancara |
| Kepala Dusun III (KD3) | Rumah Informan | 15 April 2022 | Wawancara |
| Kepala Dusun II (KD2) | Rumah Informan | 15 April 2022 | Wawancara |
| Kepala Dusun I (KD1) | Rumah Informan | 15 April 2022 | Wawancara |
| Kepala Dusun IV (KD4) | Rumah Informan | 15 April 2022 | Wawancara |
| Kepala Desa (KD) | Kantor Desa | 2 Juni 2022 | Wawancara |
| Kepala Dusun V (KD5) | Rumah Informan | 2 Juni 2022 | Wawancara |
| Pemuda Desa (PD2) | Rumah Informan | 5 Juni 2022 | Wawancara |

**Sumber: Analisis Peneliti**

## H. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan pendekatan yang peneliti pilih, yaitu pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini identik dengan lapangan, dimana pengumpulan data dilakukan secara *natural setting* atau tidak dibuat-buat. Beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, umumnya meliputi: studi dokumentasi, observasi, wawancara, dan studi literatur. Hal ini dengan memperhatikan pertimbangan bahwa dalam pengambilan data peneliti perlu berbaur dan berinteraksi secara intensif dengan informan. Dokumentasi dan pengumpulan data pendukung dalam penelitian ini peneliti gunakan untuk melengkapi serta menunjang penelitian dan untuk memaksimalkan hasil penelitian.

Pengumpulan data dapat dikerjakan berdasarkan pengalaman, namun memang dapat dipelajari metode-metode pengumpulan data yang lazim digunakan, tetapi bagaimana mengumpulkan data di lapangan serta bagaimana menggunakan teknik tersebut di lapangan (Tanzeh, 2011: 83). Alasan peneliti menggunakan teknik penelitian tersebut adalah karena pada penelitian kualitatif untuk mengumpulkan informasi melibatkan partisipasi langsung, berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan mereview terhadap dokumen yang menjadi pendukung penelitian.

1. **Observasi**

   Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti harus terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati aktivitas atau mengamati perilaku individu-individu yang menjadi partisipan penelitian maupun sebagai data sekunder penelitian. Peneliti mengamati dan mencatat terkait peran aparatur desa melalui kegiatan-kegiatan pembinaan dengan tujuan untuk mengembangkan *civic virtue* pemuda di Desa Braja Asri ditinjau dari kegiatan atau program kerja yang diadakan. Pengamatan itu selanjutnya dapat dituangkan ke dalam bahasa verbal.

**2. Wawancara**

Dalam penelitian kualitatif, teknik wawancara dilakukan kepada informan atau subjek penelitian terkait suatu objek fenomena yang menjadi interes dengan variabel penelitian dengan tujuan peneliti akan memperoleh deskripsi dalam penelitiannya. Menurut Arikunto (2010: 198), interview dapat dibedakan menjadi dua yaitu interview terstruktur dan interview tidak terstruktur. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur kepada para informan yang telah ditetapkan. Kegiatan tanya jawab dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai acuan pertanyaan dari peneliti. Namun karena peneliti menggunakan teknik wawancara terbuka *(open ended)*, maka susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat dilakukannya wawancara, termasuk karakteristik sosial-budaya (agama, suku, gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya) informan yang dihadapi.

Kegiatan wawancara terbagi menjadi beberapa tahapan. Tahapan pertama, peneliti menentukan siapa saja yang akan diwawancarai, hal ini perlu dilakukan karena peneliti harus mengetahui siapa saja yang memiliki informasi yang benar dan sesuai dengan fokus yang diteliti. Tahapan kedua, peneliti perlu menyesuaikan diri, mengetahui, memahami, dan mendalami kepribadian serta karakter informan. Dengan mengetahui semua itu, informan bisa lebih terbuka dalam memberikan informasi sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Tahapan ketiga, pada saat mengadakan pertemuan dengan informan, peneliti perlu mengetahui dan melihat situasi, kondisi, dan konteks. Hal tersebut perlu untuk dipahami oleh peneliti agar proses wawancara bisa disesuaikan dengan kondisi dan situasi informan. Tahap keempat, peneliti harus bisa mengusahakan wawancara yang akan dilakukan dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dan informasi yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian, tetapi dalam melakukan

proses wawancara peneliti harus bisa menjaga kondisi wawancara yang tidak kelihatan formal. Wawancara yang dilakukan dalam suasana santai, nyaman, dan lancar. Tahapan kelima yaitu dalam mengadakan wawancara dengan segala hasilnya, peneliti perlu untuk membuat kesimpulan sementara dan konfirmasikan simpulan itu dengan informan. Tujuannya agar informasi yang diberikan oleh informan dengan yang diterima oleh peneliti ada kesamaan persepsi. Peneliti disini melakukan kegiatan wawancara dengan kepala Desa Braja Asri, sekretaris desa, kepala dusun, dan beberapa pemuda sebagai informan dalam penelitian ini.

**3. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh keterangan dengan cara memeriksa atau mencatat laporan dokumen yang ada. Dokumentasi merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti dipilih untuk diambil mana yang sesuai dengan fokus yang hendak diteliti.

Dokumen-dokumen yang diambil dijadikan data pendukung dalam penelitian ini. Agar hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dapat disajikan lebih valid dan lebih lengkap, sehingga paparan yang dihasilkan akan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai kajian yang kredibel dan ilmiah. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini yaitu dalam bentuk dokumen tertulis, peneliti juga melakukan pengumpulan data melalui gambar selama kegiatan penelitian, seperti saat wawancara, gambar kegiatan aparatur desa saat melakukan kegiatan pembinaan, gambar keadaan Desa Braja Asri, dan dokumen lain yang dapat dijadikan sumber acuan dan kajian yang ada di pemerintahan Desa Braja Asri.

**4. Studi Pustaka**

Dalam penelitian ini, peneliti juga mengumpulkan data dan informasi bersifat teoritis yang berkaitan dengan penelitian berupa buku, jurnal, artikel, dan sebagainya guna mendukung dalam memenuhi kebutuhan penelitian.

## I. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan apakah data yang telah dikumpulkan memiliki derajat kepercayaan sehingga dilakukan pengecekan kembali.

**1. Perpanjangan Pengamatan**

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan informan yang ditemui maupun informan baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan informan akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, sehinggan informasi yang diperoleh semakin lengkap. Apabila data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau salah, tidak ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data tersebut dapat dipertanggungjawabkan berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

**2. Triangulasi**

Uji kredibilitas yang digunakan oleh peneliti diantaranya triangulasi. Dijelaskan oleh Sugiyono (2011: 4 ), triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada, triangulasi ini memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data penelitian dengan tujuan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data penelitian yang diperoleh.

3. **Menggunakan bahan referensi**

   Referensi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, data-data yang didapatkan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumentasi autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

4. ***Member check***

   Tujuan dari dilakukannya *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh informan. Jadi agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penelitian sesuai dengan apa yang dimaksud oleh sumber informasi.

## J. Teknik Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data selesai dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pengolahan data. Dalam pengolahan data ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, yang terdiri dari: *(editing)*, *(tabulating)*, *(coding)*, dan *(interpretasi data)*.

1. ***Editing***

   Kegiatan atau proses pengecekan kembali rekaman atau catatan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti disebut dengan editing. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah data tersebut cukup baik dan dapat dipersiapkan untuk proses lebih lanjut. Menurut Teguh dalam (Shofa, 2013: 48), ada beberapa hal yang perlu diperiksa secara cermat dalam editing, yaitu:

   a. Keadaan kelengkapan pengisian jawaban
   b. Keterbacaan tulisan
   c. Kejelasan makna jawaban
   d. Konsistensi jawaban
   e. Elevansi jawaban
   f. Keseragaman satuan data.

2. ***Tabulating***
   Tabulating dapat diartikan sebagai proses menyusun data atau fakta-fakta yang telah diedit lalu diberi kode ke dalam bentuk tabel. Langkah ini dilakukan untuk mempersiapkan data yang telah diolah agar dapat dipelajari dan diuji, sehingga diketahui makna data yang diperoleh.

3. ***Coding***
   Dalam proses pengolahan data, coding diartikan sebagai proses mengklasifikasikan atau mengkategorikan data menurut jenis tertentu. Pengelompokan data hasil wawancara, observasi di lapangan ke dalam kategori-kategori tertentu biasanya menggunakan simbol, baik berupa angka maupun huruf yang dapat dimengerti peneliti maupun pihak lainnya.

4. **Interpretasi Data**
   Tahap interpretasi data yaitu tahap untuk memberikan penafsiran atau penjabaran dari data yang ada pada tabel untuk dicari maknanya yang lebih luas dengan menghubungkan data dengan hasil yang lain, serta hasil dari dokumentasi yang sudah ada.

## K. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan proses pengumpulan data, maka selanjutnya adalah melakukan analisis data yang telah diperoleh tersebut. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas. Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan model Miles Huberman yang meliputi reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono, 2010):

1. **Reduksi Data *(Data Reduction)***
   Mereduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan selama melakukan penelitian. Tujuan dari mereduksi data ini adalah untuk memilih informasi atau data mana yang dianggap sesuai dengan masalah yang menjadi fokus penelitian.

Kegiatan reduksi data yang dilakukan peneliti adalan analisis menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data mengenai pembentukan dan pengembangan kebajikan kewarganegaraan pemuda yang ditinjau dari kegiatan yang dilakukan oleh aparatur Desa Braja Asri serta apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam mengembangkan kebajikan tersebut. Dengan cara yang sedemikian rupa nantinya dapat ditarik kesimpulan dan kemudian diverifikasi.

2. **Penyajian Data *(Data Display)***

   Sugiyono (2010) menjelaskan bahwa penyajian data yaitu data dan informasi yang didapat dari lapangan dimasukkan ke dalam suatu matriks, kemudian data tersebut disajikan sesuai data yang diperoleh dalam penelitian di lapangan, sehingga peneliti akan dapat menguasai data dan tidak salah dalam menganalisis data serta menarik kesimpulan. Penyajian data bertujuan untuk menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi data yang lebih sederhana sehingga lebih mudah untuk dipahami.

3. **Verifikasi (*Conclution Drawing*)**

   Tahapan selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Sugiyono (2010) mengungkapkan bahwa penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola kejelasan, dan alur sebab akibat atau proporsi dari kesimpulan yang ditarik harus segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sembari melihat catatan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat. Jadi, setelah dilakukannya pengumpulan data, melakukan pemeriksaan kelengkapan serta kejelasan data yang diperoleh, menyusun data yang diperoleh secara urut dan tertata rapih, dan yang terakhir yaitu peneliti melakukan penganalisaan data dan mendeskripsikan data tersebut sehingga data dapat dimengerti dan jelas sesuai tujuan penelitian.

## L. Rencana Penelitian

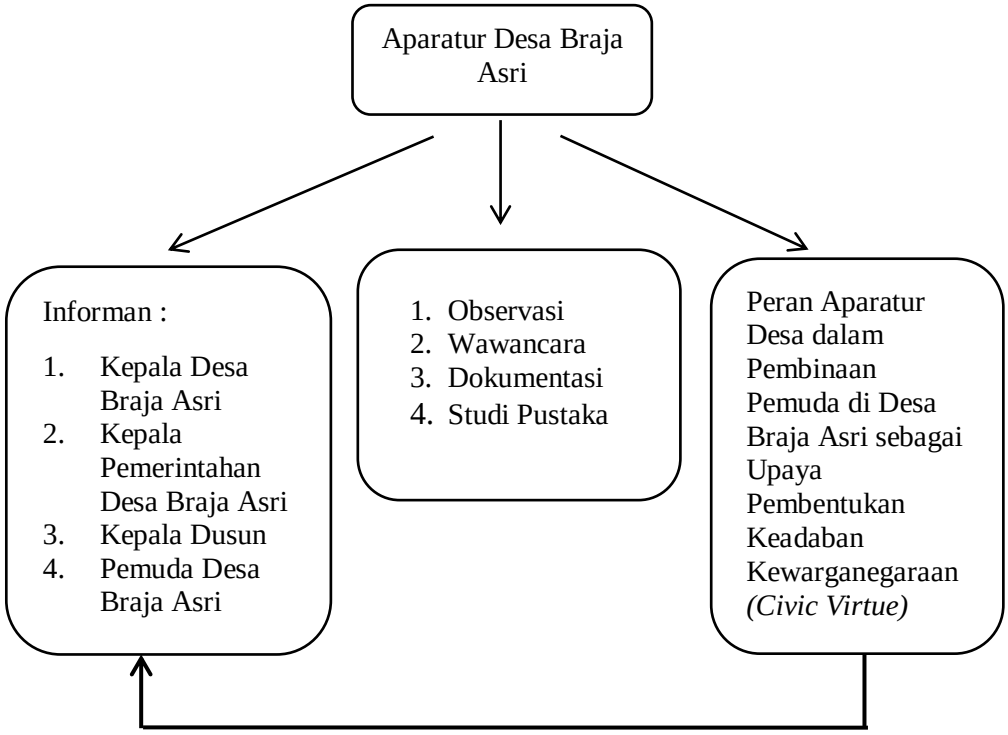


**Gambar 1 Rencana Penelitian**

Rencana penelitian ini diawali dengan proses pencarian data yaitu tentang program kerja pemerintah Desa Braja Asri. Proses pencarian data tersebut dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian dengan fokus masalah yang sudah ditentukan, maka dilakukan reduksi data mengenai peran aparatur desa melalui setiap program kerja atau kegiatannya. Setelah itu, data akan disajikan ke dalam bentuk deskriptif secara rinci bagaimana kesesuaian tingkat pelaksanaan antara praktek dan teori yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Langkah terakhir adalah verifikasi yaitu penarikan kesimpulan dari penelitian sesuai dengan fakta dan data yang telah dianalisis.

## M. Tahap Penelitian

Kegiatan penelitian merupakan suatu proses memperoleh atau mengumpulkan data suatu pengetahuan atau memecahkan permasalahan yang dihadapi, yang dilakukan secara ilmiah, sistematis, dan logis. Dalam penelitian ini, secara garis besar tahapan-tahapan yang ditempuh oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. **Persiapan Pengajuan Judul**

   Sebagai langkah awal dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu mengajukan judul yang terdiri dari dua alternatif pilihan kepada dosen pembimbing. Setelah salah satu judul mendapat persetujuan dari dosen pembimbing akademik, selanjutnya peneliti mengajukan judul tersebut kepada Ketua Program Studi PPKn pada tanggal 07 Juli 2020.

2. **Penelitian Pendahuluan**

   Langkah yang dilakukan setelah mengajukan judul ke Ketua Program Studi PPKn dan mendapatkan surat komisi pembimbing, maka selanjutnya adalah mengurus surat izin penelitian pendahuluan. Setelah mendapatkan surat izin penelitian pendahuluan dari Dekan FKIP Universitas Lampung Nomor 5225/UN26.13/PN.01.00/2020, peneliti melakukan penelitian pendahuluan ke Desa Braja Asri, Kecamatan Way Jepara. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada kepala Desa Braja Asri, sekretaris desa, serta beberapa pemuda di desa Braja Asri. Data yang diperoleh dari penelitian pendahuluan tersebut kemudian menjadi gambaran umum tentang hal-hal yang akan diteliti dalam rangka penyusunan proposal penelitian.

3. **Pengajuan Rencana Penelitian**

   Pengajuan rencana penelitian diajukan oleh peneliti untuk mendapatkan persetujuan dilaksanakannya seminar proposal. Setelah melalui tahap konsultasi dan perbaikan proposal skripsi dari pembimbing I dan II.

**4. Penyusunan Kisi dan Instrumen**

Penyusunan kisi dan instrumen penelitian bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam proses pengumpulan data dari informan yang sudah ditentukan oleh peneliti sebelumnya. Selain itu, penyusunan kisi dan instrumen dapat dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan.

**5. Penelitian di Lapangan**

Penelitian di lapangan dilakukan apabila setelah mendapatkan surat izin penelitian dari Dekan FKIP Universitas Lampung dengan **Nomor 1559/UN26.13/PN.01.00/2022** yang diajukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Timur.

# V. KESIMPULAN

## A. Simpulan

Berdasarkan observasi, dokumentasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, kemudian hasilnya dijabarkan pada pembahasan dengan didukung oleh teori-teori maka peran pemerintah desa dalam pembinaan pemuda di Desa Braja Asri sebagai upaya pengembangan keadaban kewarganegaraan *(civic virtue)* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Partisipasi pemuda dalam kegiatan pemerintahan di Desa Braja Asri sudah cukup baik dapat dibuktikan dari dilibatkannya pemuda dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi/ pemanfaatan. Namun dalam prosesnya tentu ada kendala yang dihadapi baik dari pemuda, maupun aparatur desa. Meskipun demikian, pemerintah desa terus berupaya untuk melakukan pembinaan dan menjalin komunikasi yang baik dengan pemuda untuk memotivasi dan membentuk kesadaran diri pemuda untuk terjun langsung dalam melakukan kegiatan kepemudaan.
2. Peran aparatur Desa Braja Asri dalam pembinaan kepemudaan dengan sub indikatornya yaitu pembinaan pengetahuan, pembinaan sikap, dan pembinaan keterampilan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa aparatur Desa Braja Asri sudah melakukan upaya pembinaan kepemudaan baik melalui organisasi kepemudaannya, organisasi keagamaan, dan kegiatan-kegiatan sosial. Walaupun dalam pelaksanaannya masih kurang dalam pembinaan sikap dan keterampilan. Maka perlu ada perbaikan dan upaya peningkatan agar sumber daya manusia terutama pemuda sebagai komponen penting untuk dikembangkan lebih maksimal.

3. Upaya pembentukan keadaban kewarganegaraan *(civic virtue)* pemuda yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui pembinaan memiliki peranan penting. Meskipun dalam implementasinya masih ditingkatkan kembali. Pemuda yang beradab akan memiliki kesadaran bahwa kepentingan bersama lebih penting daripada kepentingan pribadi. Ketika pemuda sudah memiliki nilai-nilai keadaban dalam dirinya maka akan memengaruhi tingkat partisipasi dan peran serta pemuda dalam masyarakat.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti lakukan yang kemudian dijabarkan dalam pembahasan, maka peneliti memiliki saran dan masukan terhadap peran aparatur desa dalam pembinaan pemuda sebagai upaya pembentukan keadaban kewarganegaraan sebagai berikut:

1. **Kepada Kepala Desa**

   Dalam pelaksanaan pembinaan, terutama untuk pemberdayaan sumber daya manusia kepala desa harus memasukkan pembinaan kepemudaan sebagai salah satu program prioritas karena pemuda juga perlu untuk diarahkan agar dapat menunjang pencapaian tujuan desa berkat kerja sama antara keduanya. Kepala desa hendaknya mendorong dan memfasilitasi para pemuda dalam berbagai programnya.

2. **Ketua Organisasi Kepemudaan**

   Memperluas jaringan komunikasi, agar tidak beruang sempit hanya pada daerah Desa Braja Asri saja, seperti melakukan *study* banding ke organisasi kepemudaan lainnya.

3. **Kepada Pemuda**

   Meskipun memiliki kesibukan lainnya, hendaknya tetap memperhatikan tanggung jawabnya di masyarakat. Selain itu, pemuda juga perlu untuk menambah pemahaman mengenai berorganisasi agar organisasi terus berjalan beserta program kerjanya.

# DAFTAR PUSTAKA


Adha, M.M. 2019. *Pengembangan Keadaban Kewarganegaraan Melalui Festival Krakatau*. (Tesis). Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.

Al-Muchtar, S. 2016. *Dasar Penelitian Kualitatif*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri.

Anggara, S.Y. 2020. *Pembinaan Moral di Lingkungan Pendidikan Pondok Pesantren Melalui Syariat Islam dalam Mengatasi Kenakalan Remaja).* (Skripsi). Universitas Pasundan. Bandung.

Anwas, O.M. 2013. Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Bandung: Alfabeta Bandung.

Arif, D.B. 2017. Pengembangan Kebajikan Kewarganegaraan (Civic Virtue) dalam Masyarakat Multikultural Indonesia : Peran Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Civic and Social Studies*, 1 (1), 1-12.

Arifin, Z. 2015. Perilaku Remaja Pengguna Gadget (Analisis Teori Sosiologi Pendidikan). *Jurnal Analisis Perilaku Sosial*, 26 (2), 287-315.

Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Belaya, D.P. 2019. *Efektivitas Peran Pemerintah Desa dalam Mengalokasikan Dana Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Surabaya Ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah).* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Bandar Lampung.

Destina, D. 2016. *Peranan Karang Taruna dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Pemuda Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan Kota Metro"* (Skripsi). Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Faridah, I.M. 2013. Toleransi antar Umat Beragama Masyarakat Perumahan. *Jurnal Komunitas*, 5 (1).

Fauzi, R. dan Roza, P. 2019. Implementasi Nilai Kebajikan Warga Negara (Civic Virtues) di Institut Teknologi Bandung. *Journal of Moral and Civic Education*, 3 (2), 92-106.

Greer, R.D., Dudek-Singer, J., dan Gautreaux, G. 2006. Observational Learning. *International Journal of Psychology*, 41 (6), 486-499.

H. Siegel. *Critical Thinking in International Encyclopedia of Edication*. 2010.

Hidayati, N. dan Harmanto. 2017. Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Civic Virtue di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan . *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan, 5* (1), 106-120.

Hoesterey, J.B. 2012. Prophetic Cosmopolitanism: Islam, Pop Psychology, and Civic Virtue in Indonesia. *Journal City and Society*, 24 (1), 38-61.

Indrawan, R., dan Yaniawati, P. 2016. *Metodologi Penelitian.* Bandung: Refika Aditama.

Istiqomah, M.N., Hardian, M., Hidayah, Y., dan Ulfah, N. 2020. The Effort to Foster Civic Virtue in Elementary Schools. *Journal of Etika Demokrasi,* 5 (2), 134-143.

Kadaria, D.N. 2019. *Dampak Lingkungan Sekolah Satu Atap Siswa SMK terhadap Siswa SMP di Yayasan Yasmida.* (Skripsi). Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Kawalod, F.A., Rorong, A., dan Londa, V.Y. 2015. Peranan Organisasi Karang Taruna dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 3 (31), 1-10.

Komalasari, K. 2011. Kontribusi Pembelajaran Kontekstual untuk Pengembangan Kompetensi Kewarganegaraan Peseta Didik SMP di Jawa Barat. *Jurnal MIMBAR*, 27 (1), 47-55.

Lutfiani, R.S. 2018. *Pembinaan Kebajikan Kewarganegaraan (Civic Virtue) Melalui Program Pendidikan Karakte Bandung Masagi: Studi Kasus di SMP Negeri 25 Bandung.* (Skripsi). Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.

Martinek, T., Schilling, T., dan Johnson, D. 2001. Transferring Personal and Social Responsibility of Underserved Youth to the Classroom. *The Urban Review*, 33 (1), 29-45.

Matei, O. 2011. The Machiavellian Concept of Civic Virtues. *Journal Society and Politics,* 5 (1), 107-115.

Mathson, S.M., dan Lorenzen, M.G. 2008. We Won't be Fooled Again: Teaching Critical Thinking Via Evaluation of Hoax and Historical Revisionist Websites in a Library Credit Course. *College and Undergraduate Libraries,* 15 (1-2), 211-230.

McDonough, M.H., Ullrich-French, S., Anderson-Butcher, D., Amorose, A.J., dan Riley, A. 2013. Social Responsibility among Low-Income Youth in Physical Activity-Based Positive Youth Development Programs: Scale Development and Associations with Social Relationships. *Journal of Applied Sport Psychology,* 25 (4), 431-447.

Muchtarom, M. 2012. Strategi Penguatan Nilai-nilai Pancasila Melalui Inovasi Pembelajaran PKn Berorientasi Civic Knowledge, Civic Disposition, dan Civic Skill di Perguruan Tinggi. *Jurnal PKn Progresif,* 7 (2), 114-130.

Neufeld, B., dan Davis, G. 2010. Civic Respect, Civic Education, and the Family. *Journal Educational Philosophy and Theory,* 42 (1), 94-111.

Oktaviani, T., Damanhuri., dan Legiani, W.H. 2019. Peranan Karang Taruna dalam Menumbuhkan Kepedulian Sosial Pemuda. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan,* 2 (2), 112-125.

Orlando, V.H. 2015. Konstruksi Sosial atas Sikap dan Cara Hidup Bertoleransi antar Umat Beragama. *Jurnal Mahasiswa Sosiologi*, 2 (4), 1-21.

Pojo, La. Misran Safar, dan Abdul Halim Momo. 2019. Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Kasimpa Jaya Kecamatan Tiworo Selatan Kabupaten Muna Barat). *Jurnal Selami IPS,* 1 (12), 441-449.

Pratama, F.F. dan Rahmat. 2018. Peran Karang Taruna dalam Mewujudkan Tanggung Jawab Sosial Pemuda sebagai Gerakan Warga Negara. *Jurnal Civics,* 15 (2), 170-179.

Prawira, Yoga. 2019. *Peranan Karang Taruna dalam Pembinaan Kelompok Pemuda di Desa Pematang Seleng Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Ratu.* (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Medan. Medan.

Rakasiwi, I.B., Hermi, Y., Yunisca, N. 2017. Peranan Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Program Indonesia Pintar. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 5 (2).

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.* Sekretariat Negara: Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Sekretariat Negara: Jakarta.

Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.* Sekretariat Negara: Jakarta.

Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.* Sekretariat Negara: Jakarta.

Ridwan, M. (2014). *Pembinaan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang.* 187-199.

Rohani. 2015. Urgensi Pembinaan Tanggung Jawab Warga Negara Melalui Community Civics. *Jurnal Pendidikan Sosial,* 2 (2), 221-234.

Rosana, E. 2014. Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal TAPIs,* 10 (1), 1-25.

Santrock, J.W. 2003. *Adolescence* (Perkembangan Remaja). Terjemahan. Jakarta: Erlangga.

Sarwono, S.W. 2015. *Teori-Teori Psikologi Sosial.* Jakarta: Rajawali Pers.

Shofa, A.T. 2013. *Analisis Sistem Rekrutmen, Seleksi dan Training Tenaga Kerja dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Karyawan.* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Malang.

Silalahi, A.D. 2018. *Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemuda terhadap Organisasi Karang Taruna.* (Skripsi). Universitas Pasundan. Bandung.

Soekanto, S. 2017. *Sosiologi sebagai Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sofyan, F.S., dan Sundawa, D. 2015. Hubungan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Semangat Nasionalisme Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 24 (2), 185-199.

Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukadi. 2011. *Pendidikan Karakter: Nilai Inti Bagi Upaya Pembinaan dan Kepribadian Bangsa: "Pendidikan Karakter Bangsa Berideologi Pancasila".* Bandung: Widya Aksara Press.

Susanti, H.D. 2011. *Pembelajaran Demokrasi dalam Pembentukan Civic Virtue Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 10 Surakarta Tahun Ajaran 2009/2010.* (Skripsi). Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Susanto, A. 2014. *Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pengembangan Kompetensi Kewarganegaraan (Civic Competences) terhadap Kehidupan Demokrasi Siswa Kelas IX SMPN 1 Bungkal Tahun Pelajaran 2013/2014*. Tesis. Repository Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Suseno, F.M. 2015. *Etika Politik. Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Tanzeh, A. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.

Triyani, E. 2020. *Pengaruh Pembelajaran Tematik terhadap Perkembangan Civic Knowledge di SDN 1 Rejosari.* (Skripsi). Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Ulumiyah, I., Abdul, J.A.G., dan Lely, I.M., 2013. Peran Pemerintah Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (5), 890-899.

Wahab A.A, dan Sapriya. 2011. *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan.* Bandung: Alfabeta.

Wianto, E.P. 2010. *Studi Analisis Pembentukan Civic Virtue dalam Ruang Lingkup Norma, Hukum, dan Peraturan di SMP Negeri 1 Gemolong Tahun 2009.* (Skripsi). Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Widhayat, W., dan Jatiningsih, O. 2018. Sikap Toleransi antar Umat Beragama pada Siswa SMA Muhammadiyah 4 Porong. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 6 (2), 596-610.

Wijayanti, D. 2015. Analisis Pengaruh Teori Kognitif Jean Piaget terhadap Perkembangan Moral Siswa Sekolah Dasar Melalui Pembelajaran IPS. *Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*, 1 (2), 83-92.

Winarno. 2019. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Yankah, E.N. 2013. Legal Vices and Civic Virtue: Vice Crimes, Republicanism and the Corruption of Lawfulness. *Journal Criminal Law and Philosophy,* 7, 61-82.

Yeyet, N. 2019. Peran Pemerintah Desa dalam Pembinaan Karang Taruna di Desa Nasol Kecamatan Cikoneng. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara,* 6 (4), 260-269.